

**ANALISIS KONFLIK KELOMPOK KEPENTINGAN KURDI DAN
PEMERINTAH TURKI TAHUN 2018 – 2023**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

FAUZAN AGUSTI FAJARIYADI

19323114

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2023

**ANALISIS KONFLIK KELOMPOK KEPENTINGAN KURDI DAN
PEMERINTAH TURKI TAHUN 2018 - 2023**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

FAUZAN AGUSTI FAJARIYADI

19323114

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS KONFLIK KELOMPOK KEPENTINGAN KURDI DAN PEMERINTAH TURKI TAHUN 2018-2023

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan
Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam
memperoleh derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Mengesahkan

Program Studi Hubungan
Internasional Fakultas Psikologi dan
Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam
Indonesia

Ketua Program Studi



Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

Tanda Tangan

- 1 Hadza Min Fadhli Robby, S.I.P., M.Sc.
- 2 Hasbi Aswar, S.I.P., M.A., Ph.D.
- 3 Rizki Dian Nursita, S.I.P., M.H.I.

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 10 Oktober 2023



Fauzan Agusti Fajariyadi

DAFTAR ISI

<i>HALAMAN PENGESAHAN</i>	<i>ii</i>
<i>PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK</i>	<i>iii</i>
<i>DAFTAR ISI</i>	<i>iv</i>
<i>DAFTAR GAMBAR</i>	<i>vi</i>
<i>DAFTAR SINGKATAN</i>	<i>vii</i>
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Cakupan penelitian	6
1.5 Tinjauan Pustaka	6
1.6 Kerangka Pemikiran	9
1.7 Argumen Sementara	12
1.8 Metode Penelitian	12
1.8.1 Jenis Penelitian.....	12
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian	13
1.8.3 Metode Pengumpulan Data	13
1.8.4 Proses Penelitian	13
1.9 Sistematika Pembahasan	13
BAB 2	15
<i>KEPENTINGAN DAN AKTOR POLITIK DALAM DINAMIKA PERPOLITIKAN KURDI DI TURKI</i>	15
2.1 Dinamika Kepentingan Politik Kurdi Dalam Konteks Sosial Politik di Turki	15
2.1.1 Kepentingan Politik Kurdi Periode Tahun 1923 - 1940.....	16
2.1.2 Kepentingan Politik Kurdi Periode Tahun 1941 - 1960.....	18
2.1.3 Kepentingan Politik Kurdi Periode Tahun 1961 - 1989.....	19
2.1.4 Kepentingan Politik Kurdi Periode Tahun 1990 - 2001.....	21
2.1.5 Kepentingan Politik Kurdi Periode Tahun 2002 - 2014.....	23
2.1.6 Kepentingan Politik Kurdi Periode Tahun 2015 - 2023.....	27
2.2 Koalisi Partai dan Aktor dalam Perpolitikan Turki Kontemporer	31
2.2.1 Cumhur İttifakı (Aliansi Rakyat)	32
2.2.2 Millet İttifakı (Aliansi Bangsa)	34
2.2.3 Emek ve Özgürlük İttifakı (Aliansi Buruh dan Kebebasan)	37

2.3 Resolusi Pemerintah Turki terhadap Kelompok Kurdi.....	39
2.3.1 Imralı Process (1999 - 2004).....	39
2.3.2 Oslo Process (2008 - 2011).....	40
2.3.3 Resolution Process (2013 - 2015)	44
BAB 3.....	48
<i>ANALISIS HUBUNGAN KELOMPOK KEPENTINGAN POLITIK KURDI DAN PEMERINTAH TURKI DALAM PERSOALAN KURDI DITINJAU MELALUI POLITICAL SETTLEMENT</i>	48
<i>3.1 Political Settlement Dominant Coalition.....</i>	48
3.1.1 Inner Circle.....	49
3.1.2 Outer Circle.....	52
<i>3.2 Political Settlement Challenger Coalition</i>	54
<i>3.3 Political Settlement Excluded Coalition</i>	56
BAB 4.....	59
<i>PENUTUP</i>	59
<i>4.1 Kesimpulan</i>	59
<i>4.2 Saran</i>	61
<i>DAFTAR PUSTAKA.....</i>	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Political Settlement	9
Gambar 2 Political Settlement Turki Tahun 1923 - 1940	17
Gambar 3 Political Settlement Turki Tahun 1941 - 1960	19
Gambar 4 Political Settlement Turki Tahun 1961 - 1989	20
Gambar 5 Political Settlement Turki Tahun 1990 - 2001	22
Gambar 6 Pembagian Gerakan Kurdi di Turki	23
Gambar 7 Political Settlement Turki Tahun 2002 - 2014	27
Gambar 8 Political Settlement Turki Tahun 2015 - 2023	30
Gambar 9 Political Settlement Turki dalam Konteks Persoalan Kurdi Tahun 2018 – 2023	58

DAFTAR SINGKATAN

AKP: *Adalet ve Kalkınma Partisi*
AYM: *Anayasa Mahkemesi*
BBP: *Büyük Birlik Partisi*
BDP: *Barış ve Demokrasi Partisi*
CHP: *Cumhuriyet Halk Partisi*
DDKO: *Devrimci Doğu Kültür Ocakları*
DEHAP: *Demokratik Halk Partisi*
DEP: *Demokrasi Partisi*
DP: *Demokrat Partisi*
DEVA: *Demokrasi ve Atılım Partisi*
DGM: *Devlet Güvenlik Mahkemeleri*
DSP: *Demokratik Sol Parti*
DTP: *Demokratik Toplum Partisi*
ECHR: *European Court of Human Rights*
EHP: *Emekçi Hareket Partisi*
EMEP: *Emek Partisi*
GP: *Gelecek Partisi*
HADEP: *Halkın Demokrasi Partisi*
HAM: *Hak Asasi Manusia*
HDP: *Halkların Demokratik Partisi*
HEP: *Halkın Emek Partisi*
HÜDA-PAR: *Hür Dava Partisi*
İYİP: *İYİ Parti*
KCK: *Koma Civakên Kurdistanê*
KRG: *Kurdistan Regional Government*
LGBT: *Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender*
MGK: *Millî Güvenlik Kurulu*
MHP: *Milliyetçi Hareket Partisi*
MİT: *Millî İstihbarat Teşkilatı*
PEMILU: *Pemilihan Umum*
PILKADA: *Pemilihan Kepala Daerah*
PKK: *Partiya Karkerên Kurdistan*
PM: *Perdana Menteri*
RUU: *Rancangan Undang-Undang*
SHP: *Sosyaldemokrat Halkçı Parti*
SMF: *Sosyalist Meclisler Federasyonu*
TAF: *Türk Silahlı Kuvvetleri*
TBMM: *Türkiye Büyük Millet Meclisi*
TİP: *Türkiye İşçi Partisi*
TÖP: *Toplumsal Özgürlük Partisi*
TRT: *Türkiye Radyo Televizyon*
UE: *Uni Eropa*
YÖK: *Yükseköğretim Kurulu*

YRP: *Yeniden Refah*
YSK: *Yüksek Seçim Kurulu*

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konflik kepentingan antara pemerintah Turki dan orang-orang Kurdi ini sejatinya telah terjadi sejak awal Turki merdeka di bawah pemerintahan Mustafa Kemal Atatürk yakni pada tahun 1923 yang kemudian konflik ini muncul pada tahun 1925 (Sahide 2013). Awal terjadinya konflik antara pemerintah Turki dan orang-orang Kurdi ini adalah karena Perjanjian Sèvres 1920 yang mana kaum Kurdi sendiri dijanjikan akan diberikan wilayahnya sendiri untuk merdeka dengan nama negara Kurdistan. Namun dikarenakan letak geografis wilayahnya yang terintegrasi ke dalam beberapa negara di sekitarnya menjadi masalah untuk mewujudkan negara Kurdistan merdeka. Ada empat negara yang terintegrasi ke dalam wilayah Kurdistan, yakni Iran, Irak, Suriah, dan mayoritas berada di Turki (Sahide 2013). Dengan populasi terbesar orang-orang Kurdi berada di Turki yakni sekitar 20% dari jumlah populasi di Turki, menjadikan mereka lebih kuat untuk bergerak di wilayah tersebut. Salah satu upaya orang-orang Kurdi untuk terus eksis memperjuangkan hak-haknya adalah dengan ikut dalam kontestasi politik dengan bergabung ke dalam partai-partai politik Kurdi maupun kelompok separatis yang mengutamakan konflik bersenjata.

Dalam memperjuangkan hak-haknya selain bergabung kelompok separatis seperti PKK, di tingkat politik orang-orang Kurdi untuk pertama kalinya mendirikan sebuah partai Kurdi pertama bernama Partai Buruh Rakyat (HEP) pada tahun 1990, yang pada pemilihan tahun 1991 melalui aliansi elektoral dengan Partai Populis

Sosial Demokrat (SHP) mendapat 22 kursi parlemen. Namun ketika deputi dari partai HEP ini meninggalkan koalisinya, partai ini kemudian dilarang oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 1993 karena dianggap mempromosikan hak budaya dan politik Kurdi. Setelah HEP bubar, dibentuk lagi sebuah partai bernama Partai Demokrat (DEP) yang akhirnya ditutup juga oleh Mahkamah Konstitusi Turki. Selain dua partai Kurdi tersebut, hal ini terus berlanjut dengan muncul partai-partai baru sebagai pengganti partai yang juga bubar karena dalam perjalanannya menemui permasalahan-permasalahan internal maupun eksternal, yang akhirnya membuat partai-partai Kurdi tersebut dari periode tahun 1993 hingga 2009 selalu dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi di Turki karena dianggap mempromosikan hak-hak budaya, politik Kurdi dan dianggap melanggar undang-undang partai politik di Turki. Partai-partai tersebut adalah HEP, DEP, HADEP, DEHAP, DTP. Kemudian setelah partai-partai tersebut bubar, muncul Partai Kurdi bernama Partai Demokrasi dan Perdamaian (BDP). Partai ini menjadi partai Kurdi pertama yang tidak dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi, namun akhirnya bubar pada tahun 2014 karena bergabung dengan Partai Rakyat Demokratik (HDP) yang masih eksis dalam kontestasi politik dalam memperjuangkan hak-hak moderat terutama hak-hak kaum Kurdi di Turki hingga sekarang (Öney 2019).

Lebih lanjut, Partai HDP ini berdiri dibentuk untuk menyatukan gerakan sayap kiri di Turki, seperti menuntut hak-hak kaum minoritas yang tertindas oleh Pemerintah seperti hak-hak perempuan, LGBT, dan tentunya hak-hak kaum Kurdi. Selain memperjuangkan hak-hak kaum minoritas dan tertindas, partai HDP juga menjunjung tinggi gerakan lingkungan, yang pada 2013 partai ini bersama komunitas

lingkungan menolak proyek energi nuklir di Turki (The New Arab & agencies 2015). Lambat laun orientasi kepentingan mereka berubah dengan lebih melebarkan sayapnya untuk juga memperjuangkan hak-hak buruh dan kebebasan sosial untuk masyarakat Turki dengan tergabung ke dalam Aliansi Buruh dan Kebebasan (Gadzhiev 2023).

Dalam perjalanannya, partai HDP ini dalam memperjuangkan kepentingannya dan memperjuangkan hak-hak dari kaum Kurdi mengalami hambatan, salah satunya dari pemerintah Turki itu sendiri. Pemerintah di sana melakukan tindakan restriktif dan represif yang membatasi ruang gerak dari HDP itu sendiri. Hal ini mereka lakukan karena pemerintah Turki menganggap bahwa HDP ini memiliki hubungan dengan kelompok teroris PKK yang akan mengancam keutuhan negara. Sehingga perilaku-perilaku pemerintah yang seharusnya menjadi pengayom bagi partai HDP sebagai salah satu partai di Turki, malah menjadi ganjalan tersendiri bagi HDP.

Pemerintah Turki melakukan banyak tindakan-tindakan untuk melemahkan partai HDP ini. Banyak terjadi peristiwa penangkapan-penangkapan para politisi dari partai HDP atas dasar tuduhan keterlibatan mereka dengan teroris PKK dan gerakan-gerakan radikal lainnya yang dianggap membahayakan. Contohnya penahanan mantan ketua partai HDP Selahattin Demirtaş. Ia ditahan sejak 2016 oleh pengadilan Turki karena dituduh terkait terorisme. Namun kemudian pada 2018, Pengadilan Hak Asasi Eropa (ECHR) menuntut pembebasan Demirtaş. ECHR menemukan adanya pelanggaran konstitusi Pasal 18 Konvensi Eropa. ECHR menganggap bahwa ada kepentingan tersembunyi dari penahanan Demirtaş, dan demikian ini dianggap sebagai penyalahgunaan kekuasaan. Namun kemudian walau ECHR telah

mengajukan tuntutan pembebasan Demirtaş, pengadilan Turki menolak pembebasannya (AFP 2018).

Terlepas dari HDP, ada hal menarik ketika koalisi pro pemerintah menarik partai Kurdi lainnya menjadi anggota koalisi yakni HÜDA-PAR. Hal ini sangatlah kontras ketika melihat sikap pemerintah dan partai pro pemerintah lainnya yang sebegitu kerasnya dalam melemahkan partai Kurdi yang menjadi oposisi, HDP. Karena partai HDP sering dituduh memiliki hubungan dengan PKK, pemerintah pun mencoba membubarkannya. HÜDA-PAR sendiri bersisi orang-orang Islam Sunni Kurdi yang berideologi Islam radikal garis keras. Berbeda halnya dengan partai HDP dan partai-partai Kurdi yang sebelumnya telah dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi Turki yang menuntut agar diberikan otonomi oleh Turki. Partai HÜDA-PAR hanya menuntut pada isu-isu yang dinilai melenceng dari ajaran Islam. Walaupun dengan kepentingannya ini partai HÜDA-PAR banyak ditentang oleh masyarakat Turki karena dinilai melanggar HAM terutama hak-hak wanita. Terlebih partai HÜDA-PAR ini dianggap sebagai perpanjangan tangan dari kelompok Hizbullah Kurdi (Berbeda dengan kelompok Syiah Lebanon) yang terlibat pembunuhan dan penculikan di masa lalu. Meski hal negatif disandingkan, ini tidak menggoyahkan Erdoğan sebagai pemimpin koalisi untuk tetap merangkul HÜDA-PAR. Karena kepentingan partai tersebut masih sejalan dengan kepentingan Erdoğan selaku pimpinan Aliansi Rakyat pro pemerintah untuk menerima HÜDA-PAR sebagai koalisi partai untuk menyatukan masyarakat Turki melalui agama. Maka dari fenomena ini penulis mencoba mengulik lebih dalam apa sebenarnya yang diinginkan oleh pemerintah Turki dan siapa yang terlibat melalui teori *Political Settlement*.

Lebih jauh, konsep *Political Settlement* ini dianggap multitafsir. Ada yang menggunakannya sebagai kerangka untuk kemudian digunakan untuk menjelaskan mengenai pertentangan dan kerjasama antara kelompok sosial, kemudian menjadi lensa untuk menganalisa kemampuan dari pemerintah dalam mengelola keragaman dan ketidakstabilan, dan juga untuk menganalisa industrialisasi dan pertumbuhan yang lambat, serta membatasi konflik. Namun kemudian konsep dari *Political Settlement* ini dapat dikatakan mengembalikan konsep dari kekuasaan klasik Laswell tentang *who gets what, when and how*, yakni konsep kesepakatan dalam pembagian kekuasaan dan sumber daya (Nurhandjati 2019).

Dari situ, penulis mencoba menjawab permasalahan yang terjadi antara pemerintah Turki dalam menghadapi orang-orang Kurdi yang memiliki kepentingan pandangan nasionalis Kurdi yang menentang. Seperti hal apa saja yang kemudian dibuat dan digunakan oleh pemerintah turki supaya kelompok-kelompok tersebut melemah dan tidak dapat bertahan dalam mempertahankan perjuangannya untuk terus menyuarakan hak orang-orang yang tertindas termasuk kaum Kurdi di Turki. Kemudian keterlibatan aktor-aktor lain dalam melanggengkan sikap tersebut dan siapa yang menjadi diuntungkan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bagian latar belakang masalah, maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

“Bagaimana hubungan antara kelompok kepentingan Kurdi dan pemerintah Turki tahun 2018-2023?”

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis hubungan dan kepentingan antara pemerintah Turki dan kelompok politik Kurdi kontemporer melalui teori *Political Settlement*.

1.4 Cakupan penelitian

Penulisan penelitian ini ditulis secara terperinci dari tahun 2018 hingga Juli 2023 yang mana di periode tahun tersebut pemerintah Turki melalui aktor politik dominan Turki yang ingin tetap terus menjaga stabilitas dan posisinya saat ini dengan terus mengandalkan segala sumber daya negara sebagai keuntungan mereka dalam melemahkan aktor-aktor yang dianggap dapat mengancam integrasi Turki sebagai negara kesatuan yang homogen. Kemudian ada manuver politik yang terjadi juga di antara aktor-aktor penantang untuk mencoba menjadi dominan dengan saling berdialog untuk merumuskan cara demi menggeser posisi dominan. Namun kemudian dalam konteks persoalan Kurdi, sebetulnya di antara kelompok penantang mereka memiliki pandangan yang berbeda dalam melihat isu Kurdi. Sehingga pola kelompok dominan, penantang, dan yang dikecualikan akan menjadi berbeda.

1.5 Tinjauan Pustaka

Pada penulisan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa sumber data pendukung guna menunjang dalam penyusunan skripsi ini. Sumber-sumber tersebut berbentuk literatur yang masih berkaitan dengan studi kasus yang tulis dalam skripsi ini. Adapun sumber-sumber data literatur yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

Pertama sebuah buku karya Ali Balcı yang berjudul *The PKK-Kurdistan Workers' Party's Regional Politics: During and After the Cold War*. Dalam buku ini dijelaskan secara runtut dan terperinci mengenai konflik dari sebuah kelompok

separatis yang kemudian dicap sebagai kelompok teroris bernama PKK dalam perjuangannya untuk mengklaim wilayahnya. Buku ini menjelaskan kegiatan konflik bersenjata antara kelompok PKK dengan negara-negara yang dianggap menduduki tanah mereka seperti Iran, Iraq, Suriah dan Turki. Selain itu dijelaskan juga bagaimana Turki bekerjasama dengan negara-negara lainnya untuk melemahkan PKK ini.

Kedua, sebuah buku karya Berna Öney yang terdiri dari tujuh bab terpisah yang berjudul *Ethnicity and Party Politics in Turkey: The Rise of the Kurdish Party during the Kurdish Opening Process*. Buku ini pada dasarnya menjelaskan secara sistematis mengenai bagaimana pemerintah dan partai Kurdi menyelesaikan masalah Kurdi. Kemudian menjelaskan bagaimana pengaruh partai-partai arus utama Turki dalam perolehan suara partai Ethno-Territorial. Selain itu buku ini juga menjelaskan mengenai tipe-tipe dari sistem partai dan juga persaingan partai dalam dimensi etnis.

Ketiga, sebuah jurnal karya Ioannis N. Grigoriadis & Esra Dilek yang berjudul *Struggling for the Kurdish vote: religion, ethnicity and victimhood in AKP and BDP/HDP rally speeches*. Fokus penelitian dalam jurnal ini adalah pada pemilu Juni 2011 dan 2015, bagaimana masing-masing dari partai AKP maupun HDP dalam memperoleh atensi atau dukungan dari warga Turki khususnya dalam mendominasi perebutan suara Kurdi dalam pertarungan politik. Jurnal ini mencoba menjelaskan bagaimana agama, etnis dan kewarganegaraan saling mempengaruhi kampanye politik dari partai-partai dan bagaimana partai-partai menempatkan klaim mereka sebagai korban untuk menarik pemilih mereka. Seperti partai AKP yang beralih fokusnya dari isu kewarganegaraan ke isu agama dan HDP yang beralih dari isu

etnisitas ke isu kewarganegaraan untuk menjawab masalah Kurdi. Dari pergeseran-pergeseran arah gerak ini namun satu yang tetap menjadi fokus mereka yakni “Korban” yang menjadi komunikasi politik mereka. Maksudnya adalah bagaimana kedua partai ini mencoba menjawab permasalahan sosial melalui isu yang mereka ambil, sehingga semakin relevan isu yang diambil semakin besar juga pendukung yang ditarik untuk memenangkan pemilu. Contohnya “Korban” AKP berfokus pada perpecahan sekularis-konservatif masyarakat Turki termasuk Kurdi. Mereka mencoba menyatukan masyarakat melalui agama. Sementara HDP melebarkan isu mereka dari masalah etnis menjadi semua warga negara yang ditindas oleh negara Turki. Jadi fokus mereka menjadi tidak hanya terkait masalah etnis Kurdi, korban dalam pandangan HDP didefinisikan juga ke dalam istilah kewarganegaraan yang mencakup seluruh warga Turki yang ditindas oleh negaranya.

Berdasarkan buku dan jurnal penelitian di atas, secara keseluruhan sumber-sumber data di atas masih berkaitan dengan studi kasus dari skripsi ini. Seperti pada sumber pertama yang menjelaskan bagaimana konflik kelompok separatis Kurdi PKK terjadi dan problematikanya dengan negara-negara yang dianggap menduduki wilayahnya. Kemudian pada sumber yang kedua juga dijelaskan dinamika partai-partai di Turki dalam menanggapi isu Kurdi dapat terjadi. Lalu sumber data ketiga menjelaskan mengenai bagaimana arah gerak dari partai AKP maupun HDP dalam menjawab permasalahan yang ada di Turki demi meraih suara dukungan.

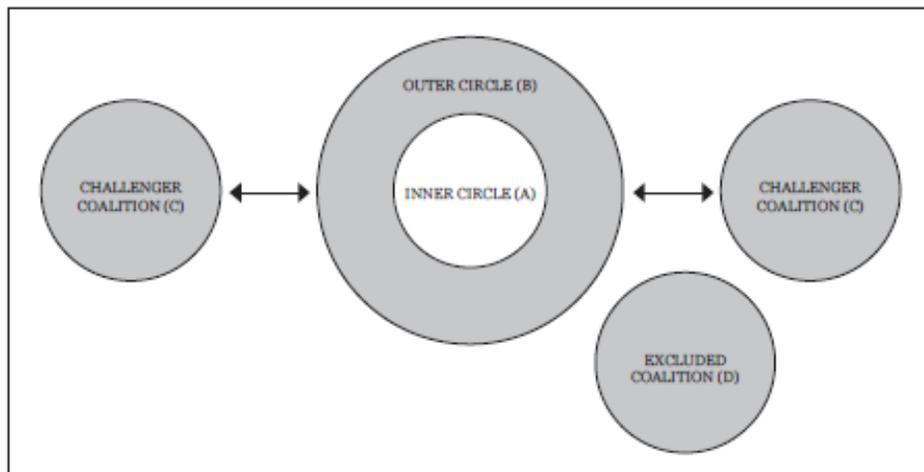
Namun dari ketiga bahan bacaan di atas masih belum ada yang menjelaskan secara spesifik bagaimana aktor-aktor lain yang masuk ke dalam masing-masing kelompok dapat terlibat dalam konflik yang terjadi. Kemudian apa saja kepentingan

yang dimiliki oleh aktor-aktor tersebut. Berangkat dari situ penulis akan membuat penelitian terkait analisis konflik yang terjadi beserta para aktornya maupun kepentingannya melalui teori *Political Settlement*. Penelitian ini dibuat sebab pembahasan studi kasus dengan teori *Political Settlement* ini belum pernah dibuat.

1.6 Kerangka Pemikiran

Teori *Political Settlement* digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis bagaimana hubungan yang terjadi di antara aktor-aktor politik yang saling terhubung untuk membentuk kesepakatan bersama. Dalam pemetaan konsep ini, dijelaskan bahwa ada dua set aktor yang menonjol yakni koalisi dominan dan koalisi penantang, namun ada kelompok ketiga yang biasanya juga muncul yakni kelompok/koalisi yang dikecualikan.

Gambar 1 Political Settlement



Sumber: Ali Riaz (2020)

Merujuk pada konsep tersebut maka di sini ada tiga variabel pada penelitian ini yang menentukan posisi mereka terhadap sumber daya yang mempengaruhi kemampuannya:

1. *Dominant Coalition*

Kelompok dominan memiliki peran penting untuk menjalankan kekuasaan dan mendistribusikan manfaat dan memastikan ketertiban dalam masyarakat. Berbicara mengenai koalisi dominan, mereka terdiri dari dua lapisan kelompok yakni:

a) *Inner Circle* .

Walaupun masih dalam satu lingkaran kelompok dengan *Outer Circle*, aktor di dalam *Inner Circle* memiliki lebih banyak akses ke sumber daya sehingga memiliki kuasa dan *power* yang lebih besar dibanding *Outer Circle*. Karena *Inner Circle* mampu menentukan kondisi hubungan mereka dengan *Outer Circle* dan bahkan terhadap mereka yang berada di luar kelompok dominan.

b) *Outer Circle*

Meskipun mereka sebetulnya juga menginginkan “*a piece of the pie*” dari sumber daya namun tidak dikategorikan sebagai kelompok penantang, karena mereka juga ingin terkooptasi ke dalam koalisi dominan.

2. *Challenger Coalition*

Merupakan kelompok penantang yang berperan sebagai pesaing dan memiliki keinginan untuk menjadi dominan. Mereka akan menjadi oposisi untuk pihak koalisi dominan dan berusaha dengan kekuatan yang mereka miliki menggunakan berbagai macam cara supaya dapat bersaing hingga mengalahkan pihak koalisi dominan.

3. *Excluded Coalition*

Merupakan kelompok yang dikecualikan namun memiliki kemampuan untuk mempengaruhi posisi dari koalisi dominan dan pada pola yang berbeda mampu untuk menjadi jembatan penghubung dari beberapa koalisi penantang yang saling berselisih (Riaz 2020).

Terlepas dari perbedaan kepentingan mereka, hubungan antara kelompok dominan dan penantang ini jika dipahami secara mendalam, mereka sebetulnya saling terhubung dan memiliki jaringan yang kompleks karena memiliki berbagai macam segmen populasi dan tidak otonom serta bisa saling terhubung oleh kepentingan masing-masing atau dengan cara lain semisal hubungan kekeluargaan atau kedekatan spasial. Hal ini membuat hubungan mereka sebagai kelompok penantang dan dominan menjadi tidak statis karena dapat didefinisikan ulang dan dinegosiasikan ulang (Riaz 2020). Dengan kata lain kondisi ini hanya sementara dan dapat berubah sewaktu-waktu. Berdasarkan kondisi ini akhirnya membuat *Political Settlement* ini tidak memiliki pola dasar yang kemudian dapat menjadi acuan dari setiap peristiwa yang terjadi. Namun pola terbentuk tergantung pada tujuan dan aktor. Namun yang pasti dari *Political Settlement* ini adalah ia mencakup tiga dimensi yakni: politik, ekonomi, dan sosial (Hassan 2013).

Kemudian Ali Riaz (2020) mengungkapkan walaupun pola *Political Settlement* yang terbentuk berbeda-beda namun diakui ada tiga cara dalam mempertahankannya yakni dengan cara: Paksaan, Kooptasi, dan Legitimasi. Dalam konteks kenegaraan ada tiga dimensi yang menurutnya merupakan prasyarat supaya *Political Settlement* dapat bertahan yakni: kapasitas, otoritas dan legitimasi Sehingga

secara garis besar teori ini memaparkan bahwa bisa oleh siapa saja aktor di dalam Koalisi Dominan pada konteks kenegaraan dapat diisi, baik oleh elite politik ataupun militer sampai elit bisnis yang menurut Park (2010) memiliki legitimasi yang kuat untuk mempertahankan *Political Settlement* untuk jangka panjang yang juga dapat dibentuk melalui *Political Settlement* itu sendiri.

1.7 Argumen Sementara

Penulis memiliki argumen sementara dari studi kasus yang diambil yakni mengapa pemerintah Turki tidak mengakomodasi kepentingan kelompok Kurdi adalah karena memang kepentingan kelompok Kurdi tersebut tidak sejalan dengan kepentingan dari pemerintah. Oleh karenanya kelompok Kurdi ini dianggap sebagai ancaman dari integrasi negara mereka sehingga pemerintah mencoba melemahkan mereka dengan melakukan tindakan-tindakan yang bersifat represif dan juga tidak segan pemerintah mengkriminalisasi anggota kelompok tersebut walau tanpa bukti yang jelas. Kemudian hadirnya kelompok kepentingan Kurdi ini juga dapat melemahkan elit politik dominan yang kini sedang berkuasa. Hal ini terjadi karena kelompok politik Kurdi terbesar ini telah menentukan sikapnya untuk mendukung oposisi politiknya juga ingin menjadi dominan. Sehingga dengan alasan tersebut mengapa akhirnya kelompok Kurdi yang memiliki pengaruh dan tak sejalan akan dilemahkan.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu jenis pendekatan penelitian dalam ilmu sosial yang

menggunakan paradigma alamiah, berdasarkan teori fenomenologis (dan sejenisnya) untuk meneliti masalah sosial dalam suatu kawasan dari segi latar dan cara pandang obyek yang diteliti secara holistic (Abussamad 2021). Maka dari itu, metode ini digunakan untuk meneliti konflik antara pemerintah Turki dan kelompok kepentingan Kurdi.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah pemerintah Turki dan kelompok kepentingan Kurdi. Sedangkan objek penelitian ini adalah kepentingan dari pemerintah Turki dalam pelemahan kelompok Kurdi.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder. Maka data-data yang diambil berasal dari buku, jurnal, website atau berita yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.

1.8.4 Proses Penelitian

Dalam proses penelitian ini penulis mengambil dan mengumpulkan kemudian memilah data dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, laman berita yang kredibel dan relevan dengan topik bahasan. Selanjutnya penulis menyusun bagian-bagian sub-bab bahasan dari data yang diperoleh. Kemudian terakhir sampai dengan tahap pemaparan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan.

1.9 Sistematika Pembahasan

Pada bab pertama penulis akan menjabarkan alasan mengapa mengambil judul “Analisis Konflik Kelompok Kepentingan Kurdi dan Pemerintah Turki Ditinjau Melalui *Political Settlement* di Turki Tahun 2018 - 2023”. Kemudian pada bab kedua

penulis akan memaparkan bagaimana posisi kelompok Kurdi pada beberapa periode dan juga menjelaskan siapa saja aktor politik yang ada di dalamnya. Pada bab ketiga penulis akan menjelaskan secara terperinci hubungan antara pemerintah Turki dan kelompok kepentingan Kurdi beserta aktor-aktor lain yang terlibat di dalamnya dengan menggunakan *Political Settlement*. Terakhir pada bab keempat penulis akan menuliskan benang merah dari studi kasus pada kesimpulan dan rekomendasi kebijakan dan tindakan yang harus diambil Turki dalam menyelesaikan permasalahannya dengan kelompok kepentingan Kurdi.

BAB 2

KEPENTINGAN DAN AKTOR POLITIK DALAM DINAMIKA

PERPOLITIKAN KURDI DI TURKI

Pada bab ini penulis akan membahas sejarah dari dinamika kepentingan politik Kurdi yang mana ini akan dibutuhkan sebagai pengantar bagaimana sejarah dari hubungan Kurdi dan Turki dari awal Turki terbentuk sebagai negara republik hingga sekarang. Bab ini menjadi bagian untuk proses dalam menjawab rumusan masalah dengan membahas kepentingan politik dari Kurdi di Turki yang kemudian akan dibagi ke dalam beberapa periode pemerintahan di Turki dengan menggunakan berbagai sumber pendukung. Adapun pada sub bab pertama yakni akan membahas dinamika kepentingan Kurdi di Turki antara tahun 1923 sampai 2023 yang dibagi ke dalam beberapa periode tahun. Kemudian pada sub bab kedua akan membahas mengenai koalisi partai politik kontemporer Turki. Selanjutnya pada sub bab terakhir akan membahas mengenai resolusi sebagai upaya yang dilakukan Turki-Kurdi untuk mencapai kesepakatan perdamaian.

2.1 Dinamika Kepentingan Politik Kurdi Dalam Konteks Sosial Politik di Turki

Keberadaan suku Kurdi saat ini sebagai suku terbesar di dunia yang tidak memiliki negara bukan tanpa sebab. Kurdi dahulu memiliki wilayah sendiri bernama Kurdistan yang sekarang berdiri negara-negara kontemporer seperti Turki, Suriah, Irak dan Iran sejak kerajaan Ottoman runtuh ketika kalah pada Perang Dunia I. Ini terjadi karena saat itu sekutu membuat perjanjian bernama Lausanne yang membuat Kurdi kehilangan wilayahnya. Tentunya dengan keadaan seperti ini suku Kurdi tidak hanya diam, mereka terus berusaha untuk memperjuangkan haknya. Gerakan-gerakan

pemberontakan, demonstrasi dan orasi terus dilakukan oleh orang-orang Kurdi, bahkan saat penelitian ini ditulis mereka masih melakukannya. Wilayah otonom yang diimpikan oleh suku Kurdi sekilas merupakan hal yang utopis jika melihat kondisi sekarang. Karena untuk meraih kedaulatan penuh atas wilayah Kurdistan, tentunya mereka harus bisa menumbangkan dari empat negara seperti Turki, Suriah, Iran, dan Irak yang sekarang masih berdiri di atas tanah mereka.

2.1.1 Kepentingan Politik Kurdi Periode Tahun 1923 - 1940

Pada awal keruntuhan dari kejayaan Kesultanan Ottoman yang kalah pada Perang Dunia I terhadap tentara sekutu, membuat wilayah Ottoman pecah dan terbagi ke beberapa wilayah seperti Irak, Iran, Turki dan beberapa wilayah lain di sekitarnya. Kemudian pembagian wilayah ini dimaktubkan dalam perjanjian damai Sèvres tahun 1920 antara Ottoman dengan sekutu yang mana wilayah Kurdistan termasuk di dalamnya. (Romano 2014).

Pada tahun 1923 setelah tanah Turki berada pada genggamannya Mustafa Kemal Atatürk, ia mencoba menguatkan kembali posisinya dengan meratifikasi perjanjian damai Turki modern dengan sekutu yang disebut Perjanjian Lausanne. Dalam perjanjian tersebut secara garis besar isinya adalah terkait dengan pembagian wilayah Turki setelah Ottoman runtuh, seperti wilayah-wilayah yang dulunya dikuasai Ottoman beberapa diserahkan kepada sekutu. Titik yang paling krusial adalah dihapuskannya tuntutan sekutu atas wilayah otonom Kurdi yang sebelumnya ada dalam Perjanjian Sèvres. Maka dengan diratifikasinya perjanjian baru ini membuat isi Perjanjian Sèvres sebelumnya menjadi tidak berlaku lagi yang akhirnya membuat posisi Kurdi atas tuntutan wilayahnya semakin termarjinalkan (Brinnatinica 2023).

Dengan Mustafa Kemal Atatürk sebagai pimpinan yang berpegang teguh dengan ideologinya yang dikenal sebagai Kemalism yang disebut *Six Arrows* (Enam Panah) yakni: *republicanism, nationalism, populism, reformism, etatism* dan *secularism* membuat kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Atatürk membuatnya lebih condong ke undang-undang bergaya eropa yang membuatnya lebih jauh dari aturan-aturan islam (Library of Congress Federal Research Division 1996). Mustafa Kemal Atatürk juga membuat kebijakan khusus atas suku non Turki terutama Kurdi untuk menciptakan masyarakat Turki yang homogen. (Hayati 2017).

Dengan diratifikasinya perjanjian baru oleh Atatürk sebagai elit politik Turki untuk mempertahankan keutuhan wilayah Turki, kemudian juga kebijakan asimilasi paksa untuk menciptakan masyarakat yang homogen di Turki, akhirnya memicu gerakan nasionalis dari orang-orang Kurdi. Hingga menjelang pergantian presiden pertama Turki tersebut disahkan juga *The Resettlement Law of 1934* yang juga disebut para akademisi sebagai asimilasi paksa Turki yang juga digunakan sebagai alat penghancuran wilayah Kurdi di provinsi timur Turki yang akhirnya menimbulkan pemberontakan Dersim pada tahun 1937 (Üngör 2011).

Gambar 2 Political Settlement Turki Tahun 1923 - 1940



Sumber: Pola Pribadi

Pada periode tahun inilah mulai terbentuk gerakan nasionalis Kurdi untuk menjadi cikal bakal kelompok penantang sebagai kosekuensi atas sikap hegemoni kelompok dominan untuk menciptakan masyarakat yang homogen dengan diratifikasinya perjanjian Lausanne dan kebijakan asimilasi paksa yang akhirnya memicu penolakan keras dari warga non Turki yang sudah menetap lama di sana karena ingin tetap menjaga budaya lokal mereka.

2.1.2 Kepentingan Politik Kurdi Periode Tahun 1941 - 1960

Setelah kondisi hiruk-pikuk dengan banyaknya aksi pemberontakan karena penolakan kebijakan turkifikasi, selanjutnya dengan memasuki tahun 1940-an sampai tahun 1950-an, hubungan antara Turki dan Kurdi di bawah pemerintahan presiden yang baru yakni Mustafa İsmet İnönü membawa kondisi politik pada dekade tersebut cenderung tenang tanpa ada aksi-aksi yang melibatkan banyak orang dan menimbulkan korban (O'Connor 2017). Sebaliknya konflik kembali terjadi pada tahun 1960 dengan adanya kudeta terhadap pemerintahan saat itu yang didalangi oleh militer di Turki karena menentang kebijakan baru yang dibuat oleh PM Turki Adnan Menderes untuk memberi kebebasan bagi orang-orang Islam untuk beribadah dengan membuka kembali masjid-masjid di Turki dan memperbolehkan adzan menggunakan penguat suara (Kurban 2020).

Dengan kebijakan baru ini, membuat militer Turki di sini akhirnya berperan sebagai kelompok penantang karena setelah kebijakan baru kelompok dominan yang dinilai terlalu pro terhadap kelompok sosialis Turki yang kemudian memunculkan penolakan dari militer sehingga memicu terjadinya kudeta pada tahun 1960.

Gambar 3 Political Settlement Turki Tahun 1941 - 1960



Sumber: Pola Pribadi

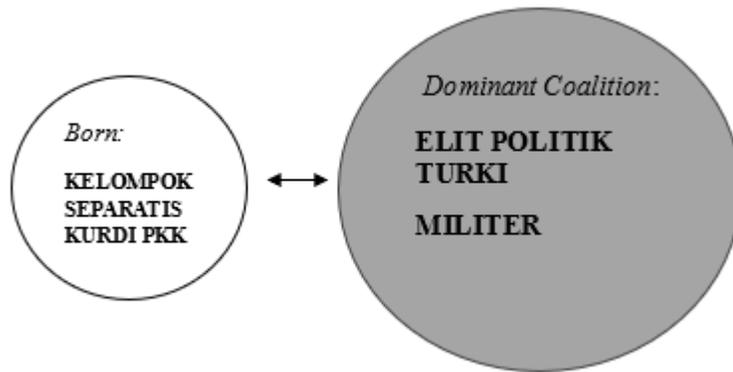
2.1.3 Kepentingan Politik Kurdi Periode Tahun 1961 - 1989

Penguatan hak kebebasan di bawah konstitusi Turki 1961 memberi kejayaan seperti yang disebut oleh McDowall (2004) sebagai "*The Kurdish National Revival*". Walau dibawah diskriminasi politik yang begitu kuat dari nasionalis Turki, orang-orang Kurdi tetap bergerak untuk terus menuntut hak kebebasannya untuk lepas dari tangan Turki. Dalam beberapa tahun, sudah terbentuk kelompok revolusioner Kurdi yang tak terhitung jumlahnya termasuk kelompok *Devrimci Doju Kültür Ocakları* (DDKO) yang dianggap sebagai cikal bakal terbentuknya PKK sekarang. Dengan berideologi politik Marxisme dengan wacana anti imperialis, mereka menganggap negara Turki saat itu sebagai sebuah "*Colonial Power*" yang menindas suku Kurdi dan menyerukan kemerdekaan negara Kurdistan atau hak otonomi. Dari munculnya banyak gerakan-gerakan dari kelompok sayap kiri ini akhirnya membuat nasionalis Turki melakukan kudeta kembali pada tahun 1971 karena menganggap pemerintah tidak cakap dalam menangani konflik saat itu.

Akhirnya setelah kudeta itu, ribuan aktivis Kurdi ditangkap oleh aparat turki untuk menghancurkan gerakan nasionalis Kurdi. Intoleransi rezim terhadap

perbedaan pendapat, meningkatnya polarisasi ideologis dan kurangnya prospek demokrasi menyebabkan beberapa Kurdi melihat bahwa satu-satunya jalan untuk kehidupan yang layak adalah dengan memerdekakan diri. Setelah rasa frustrasi yang begitu tinggi di kubu Kurdi, akhirnya pada tahun 1978 *Partiya Karkerên Kurdistan* (PKK) lahir sebagai gerakan Kurdi separatis bersenjata pertama di Turki di bawah pimpinan Abdullah Öcalan dengan tujuan yang sama dengan gerakan-gerakan Kurdi sebelumnya (Kurban 2020). Setelah kudeta, militer Turki akhirnya menjadi bagian dari kelompok dominan dan menjadi patron dalam pemberantasan gerakan Kurdi. Kemudian munculnya PKK ini merupakan inisiasi baru dari orang-orang nasionalis Kurdi sebagai kelompok penantang untuk menciptakan gerakan yang lebih terorganisir menjadi satu setelah gerakan-gerakan sebelumnya bergerak dari kelompok Kurdi yang terpecah-pecah.

Gambar 4 Political Settlement Turki Tahun 1961 - 1989



Sumber: Pola Pribadi

Memasuki tahun 1990, pasukan militer dan para pengambil kebijakan Turki mulai menanggapi serius terkait ancaman dari orang-orang Kurdi melalui PKK berikan terhadap negara Turki. Di pertengahan tahun 1990-an pasukan TAF yang kemudian terkooptasi ke dalam kelompok dominan, memimpin upaya pemberantasan

gerakan Kurdi dengan melakukan kampanye anti pemberontakan untuk menurunkan serangan PKK pada tahun tersebut. Kemudian pada tahun 1997, aksi teroris dari PKK benar-benar sudah menurun dan terkendali. Untuk memastikan dalam mengakhiri PKK, Turki mencoba untuk menangkap pimpinan PKK yakni Abdullah Öcalan yang sudah tinggal di Damaskus sejak tahun 1980-an. Akhirnya usaha ini membuahkan hasil, Öcalan kemudian berhasil ditangkap di Kenya pada Februari tahun 1999 dan kemudian dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Keamanan Negara Turki (DGM) (Pusane 2015).

2.1.4 Kepentingan Politik Kurdi Periode Tahun 1990 - 2001

Kemudian memasuki awal 1990-an dengan memasuki era kontraterorisme, Kurdi sebagai pihak yang terus memperjuangkan haknya untuk mendapat kebebasan dalam mempertahankan tradisi dan budaya, akhirnya mencoba cara lain untuk “menantang” negara melalui mobilisasi hukum dan mulai memasuki cara politik tanpa kekerasan yakni dengan berpartisipasi dalam pemilihan elektoral.

Para politisi Kurdi ini mencoba memasuki Majelis Nasional Agung (TBMM) dari Partai Kerakyatan Sosial Demokrat (SHP), namun mereka akhirnya dikeluarkan dari SHP karena diketahui ikut dalam konferensi internasional yang membahas masalah Kurdi. Kemudian mereka membangun kembali partai yang dinamai Partai Buruh Rakyat (HEP) yakni partai pro Kurdi yang pertama yang sangat cepat berkembang saat itu. Walau pun partai HEP ini berdiri tanpa campur tangan PKK, namun mereka tetap memiliki basis sosiologi yang sama dan memiliki ideologi politik yang serupa.

Gambar 5 Political Settlement Turki Tahun 1990 - 2001



Sumber: Pola Pribadi

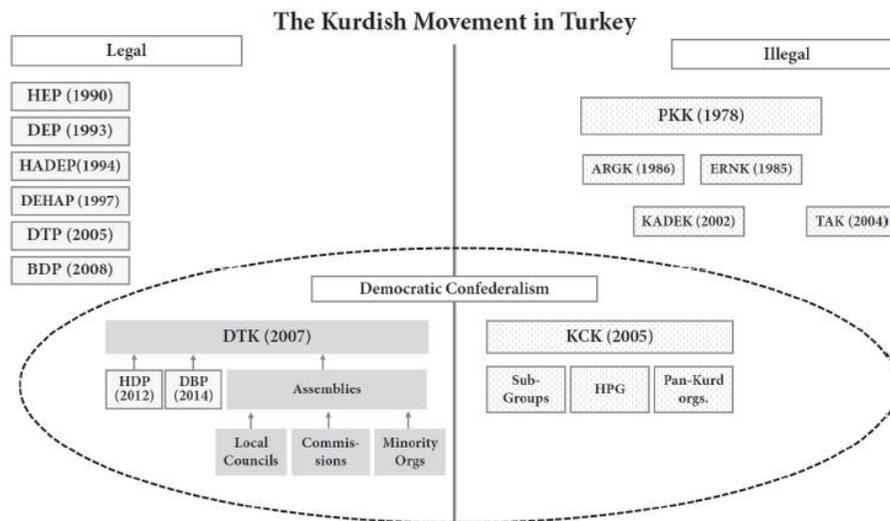
Kondisi pada pertengahan antara tahun 1990-2000 di Turki dengan memasuki era kontraterorisme, saat itu lebih banyak konflik di tingkat partai politik. Yang mana ketika orang-orang Kurdi mulai aktif berpolitik dalam menyerukan kepentingan demi berdirinya wilayah Kurdistan yang otonom, di sisi lain dengan alasan berhubungan dengan PKK pemerintah Turki dengan sigap menindaknya yang kemudian berakhir partai politik tersebut harus dibubarkan (Kurban 2020).

Sehingga pada periode tahun ini mulai tercipta dua kutub arah gerak yang ditandai terbentuknya partai parlemen pro Kurdi di Turki dan juga kelompok militan PKK. Sehingga pada periode tahun inilah awal mula terbentuknya partai politik Kurdi sebagai gerakan baru Kurdi di Turki yang kemudian menciptakan *Legal Movement* yang melalui partai-partai tersebut sehingga dapat masuk ke parlemen di Turki untuk menyerukan hak-hak Kurdi yang terampas oleh negara seperti pelarangan dalam penggunaan bahasa Kurdi di Turki dan penggunaan atribut Kurdi.

Terbentuknya dua kutub gerakan Kurdi ini menandai perjuangan Kurdi dalam memperjuangkan kepentingannya sebagai pihak yang termarginalisasi tidak hanya sebagai gerakan separatis, namun juga melalui *legal movement* sebagai partai politik. Sehingga ketika Uni Eropa mulai menyebut PKK sebagai kelompok teroris, ini tidak

akan mempresentasikan orang-orang Kurdi secara keseluruhan sebagai orang-orang separatis. Namun mereka akan tetap memiliki legitimasi dengan bergerak sebagai partai politik yang sah.

Gambar 6 Pembagian Gerakan Kurdi di Turki



Sumber: Francis O'Connor (2017)

2.1.5 Kepentingan Politik Kurdi Periode Tahun 2002 - 2014

Selanjutnya memasuki tahun 2002 ketika AKP mulai berkuasa dan saat itu Erdoğan sudah naik ke tampuk kekuasaan di Turki sebagai Perdana Menteri dengan memenangi pemilihan umum ketika partai dominan lainnya runtuh karena krisis ekonomi Turki, Erdoğan mulai melakukan revolusi dalam menghadapi permasalahan sosial politik di Turki. Melihat sejarah sebelum AKP berkuasa pada tahun 2002, masa-masa itu digambarkan sebagai masa pemerintahan rezim yang tidak demokratis ketika di bawah pengaruh militer. Saat itu militer menggunakan wacana keamanan untuk melindungi sekularisme dan negara-bangsa yang akhirnya membatasi legitimasi ruang politik.

Erdoğan yang sudah mulai berkuasa sejak runtuhnya pengaruh militer sebagai kelompok dominan sebelumnya, mulai melakukan revolusi dengan mengubah paradigma keamanan Turki yang mapan dan memperluas kebebasan sipil. Bersamaan dengan antusiasme dari AKP yang ingin bergabung dengan Uni Eropa, ia juga melakukan advokasi norma-norma universal seperti masalah HAM, kebebasan sipil, demiliterisasi, dan toleransi. Ini dilakukan dengan harapan dapat mengakhiri konflik bersenjata yang telah dimulai sejak tahun 1984. Maka ketika era militer telah usai, AKP melakukan pendekatan terhadap isu hak budaya masyarakat dan kelompok-kelompok minoritas serta isu yang berkaitan dengan otonomi pemerintah daerah sengaja ditonjolkan. Setelah AKP menentukan sikap ini, proses dalam mencapai perdamaian ini dilakukan bertahap sejak tahun 2002 ini hingga 2014 sebelum pecahnya kembali konflik antara militer Turki dengan PKK (O'zpek 2019).

Mulai pada awal tahun 2009, dengan kelompok dominan baru yang bercita-cita mengakhiri konflik dengan mengkooptasi birokrasi, mulai mengenalkan upaya perdamaian sistematis pertama dalam menyelesaikan masalah Kurdi bernama *Democratic Opening* atau *Demokratik Açılım* dalam bahasa Turki, namun akademisi banyak menyebutnya sebagai *The Kurdish Opening*. Proses ini membawa perubahan dramatis dari pendekatan pemerintah Turki terhadap Kurdi yang juga didukung oleh undang-undang seperti, mendirikan lembaga HAM yang independen, pembentukan komisi pengaduan terhadap pasukan keamanan Turki, legalisasi kampanye PEMILU dan propaganda dalam bahasa selain Turki, stasiun TV swasta 24 jam dapat mengudara tanpa bahasa Turki, peluncuran siaran kanal TRT 6 dalam bahasa Kurdi, izin diberikan kepada Universitas dalam mengajar dalam bahasa Kurdi dan Zazaki,

penggantian nama kawasan sesuai keinginan masyarakat setempat, serta izin ke layanan sosial dan keagamaan dalam bahasa lain selain bahasa Turki.

Dengan berjalannya proses perdamaian ini diharapkan kelompok penantang yakni PKK dapat melucuti senjatanya dan meninggalkan wilayah Turki. Adapun *The Kurdish Opening* ini didasarkan pada pengambilan keputusan kolektif deliberatif dengan kontribusi dari pihak ketiga dan penekanan khusus diberikan pada diplomasi publik dan dimensi musyawarah dari proses ini.

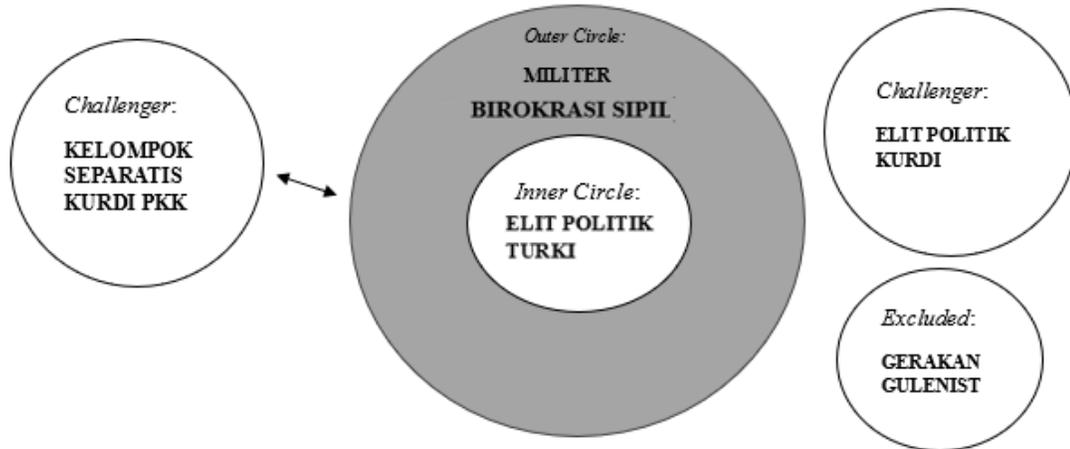
The Kurdish Opening mendapat nama resmi pada Januari 2010 dengan nama "*Democratic Opening: National Unity and Fraternity*". Proses perdamaian ini secara luas mempertimbangkan masalah Kurdi melalui sisi pembangunan ekonomi, demokratisasi dan keamanan. Dengan mengembangkan hak dan kebebasan fundamental, meredakan masalah identitas, mencegah diskriminasi, dan membangun partisipasi politik yang setara, *The Kurdish Opening* bertujuan untuk melembagakan koalesensi nasional. Proses ini dilihat sebagai cara mencapai tujuan untuk mengakhiri terorisme melalui jalur demokratisasi. Namun akhirnya melemah ketika provokatif dari PKK ke Turki kembali melalui *Habur Border Gate*. Setelah inisiasi dari *The Kurdish Opening* runtuh, selanjutnya terbentuk lagi inisiasi yang kedua yang disebut sebagai *Resolution Process* atau *Çözüm Süreci* dalam bahasa Turki.

Proses resolusi atau *Resolution Process* ini adalah proses top-down yang melibatkan negosiasi antara Öcalan atas nama Gerakan Nasionalis Kurdi dan negara Turki. Kemudian studi berpendapat bahwa *Resolution Process* ini muncul sebagai konsekuensi dari *Kurdish Opening*. Proses resolusi ini merupakan sebuah kesepakatan damai antara pemerintah Turki dan Kurdi yang diumumkan oleh PKK

pada 23 Maret 2013. Namun kemudian kesepakatan ini runtuh pada 2015 dan memicu kembali konflik-konflik bersenjata di antara kedua belah pihak (Köse 2017).

Ditemukan pada sebuah sumber bahwa proses ini dilihat dari sudut pandang kelompok dominan yang kemudian mengkooptasi birokrasi Turki saat itu terkait kepentingannya untuk kenaikan statusnya sebagai kandidat dalam keanggotaannya di Uni Eropa. Maka dalam proses ini Turki diharuskan merubah beberapa peraturannya terutama yang menyangkut masalah Kurdi sebelum negosiasi keanggotaannya secara penuh di UE dimulai. Adapun 32 pasal dalam konstitusi Turki yang harus diubah. Dari semua pasal tersebut, ada satu pasal penting yang mengatur tentang kebebasan berekspresi yakni Pasal 26. Dalam pasal yang dihapus tersebut termaktub pernyataan bahwa “Tidak ada bahasa yang dilarang oleh undang-undang yang boleh digunakan dalam pengungkapan dan penyebaran pemikiran”. Sehingga otomatis aturan yang melarang publikasi dan penyiaran dalam bahasa Kurdi dicabut. Dengan adanya amandemen hukum ini juga membuat pembelajaran, pengajaran dan penyiaran dalam bahasa Kurdi dapat secara bebas diperkenalkan pada Agustus 2002. Pada tahun ini juga peraturan terkait hukuman mati di Turki pun dihapus, sehingga membuat Öcalan yang telah dijatuhi hukuman mati pada tahun 1999 dapat terbebas dari hukuman tersebut. Sehingga atas dasar ini memunculkan batu loncatan untuk proses resolusi damai selanjutnya antara Turki dan Kurdi (Yeğen 2015).

Gambar 7 Political Settlement Turki Tahun 2002 - 2014



Sumber: Pola Pribadi

2.1.6 Kepentingan Politik Kurdi Periode Tahun 2015 - 2023

Memasuki tahun 2015 ini, tentunya apa yang diharapkan sebelumnya oleh orang Kurdi, Turki bahkan masyarakat dunia akan terjadinya hubungan yang damai antara kelompok Kurdi dan pemerintah Turki menjadi cita-cita yang sangat diimpikan. Mengingat gencatan senjata yang dibentuk adalah atas dasar kesamaan rasa untuk saling merangkul sebagai warga yang tinggal di Turki dengan menerima perbedaan ras dan agama. Namun apalah daya kepentingan mereka tidak dapat saling mengakomodasi, sehingga terjadi perbedaan kepentingan yang mengakibatkan runtuhnya perjanjian yang terbentuk pada Maret 2013 lalu.

Pada Juli 2015 gencatan senjata dan perjanjian damai antara pemerintah Turki dan kelompok PKK runtuh. Ini terjadi karena adanya perubahan kebijakan politik yang dilakukan Erdoğan, ketakutan negara Turki akan hak otonom wilayah Kurdi yang dituntut dan dinamika yang terjadi pada tingkat lokal di tenggara Turki yang akhirnya ini merusak dari perjanjian damai yang telah dibuat selama dua tahun. Dengan runtuhnya gencatan senjata ini membuat eskalasi konflik yang sangat besar

antara PKK dengan pemerintah Turki. Bahkan sejak konflik ini meningkat, mengakibatkan kota Kurdi hancur dan mengusur sekitar 350.000 warga sipil serta memakan korban jiwa sebanyak 4.397 orang warga sipil. Lebih luas, ini membuat kosekuensi politik semakin mengerikan yang membentuk polarisasi kepentingan di antara dua kelompok, represi politik dan pelanggaran HAM besar-besaran. Puluhan ribu warga Turki yang sebagian besar adalah orang Kurdi, dipenjara atas tuduhan terorisme tanpa bukti yang jelas, termasuk pemimpin partai HDP Selahattin Demirtaş dan pemimpin Kurdi lainnya (Hoffman 2019). Dengan kekuatan kelompok *inner circle* dalam mengandalkan birokrasi dan militer dalam melemahkan kelompok Kurdi sebagai penantang. Membuat posisi AKP sebagai *inner circle* menjadi sangat kuat.

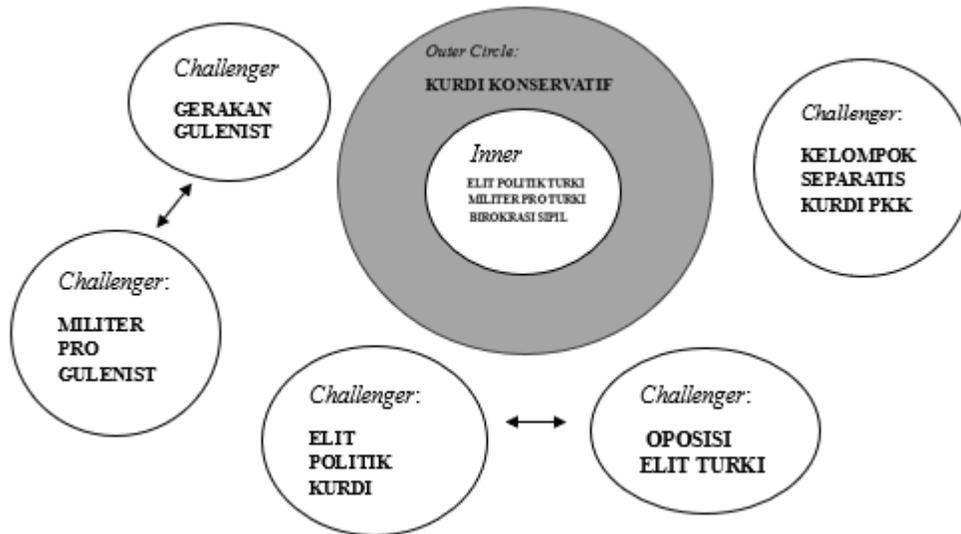
Memasuki tahun 2016, dengan kondisi sosial politik saat itu yang carut marut karena banyaknya konflik dan gerakan bersenjata saat itu berhasil mencapai puncaknya. Pada tanggal 15-16 Juli 2016, militer yang melihat bahwa pemerintah saat itu gagal dalam menyelesaikan masalah yang terjadi telah menyusun strategi untuk melakukan kudeta. Namun ada perbedaan sedikit pada kudeta kali ini dengan kudeta-kudeta yang telah terjadi sebelumnya. Jika dahulu kudeta dilakukan oleh militer tanpa ada campur tangan pihak ketiga, namun di tahun 2016 ini pemerintah Turki melalui Juru Bicara Negara Ibrahim Kalin menyatakan bahwa kudeta dilakukan oleh sebagian kecil Junta yang terhubung ke Gulenist (mantan koalisi AKP di masa lalu). Kemudian Erdoğan melihat ini sebagai tindakan yang berlebihan dan dianggap sebagai serangan personal terhadap dirinya. Karena kejadian ini Erdoğan menutup banyak sekolah di Turki yang berada dibawah Gulen dan pemerintah juga mengajukan RUU dan disahkan pada 28 Februari 2014 yang menyatakan bahwa

semua sekolah swasta di bawah naungan Gerakan Gulen dianggap sebagai lembaga yang tidak sah. Tentunya tindakan Erdoğan ini mendapat reaksi keras dari Gulen yang akhirnya ini membentuk eskalasi konflik antara Erdoğan dan Gulen (Arifin and Sari 2020)

Selanjutnya, kelompok *inner circle* melihat kesempatan untuk terus menjaga posisinya sebagai kelompok dominan dengan mengandalkan birokrasi adalah dengan melakukan referendum untuk mengamandemen sistem pemerintahan. Melalui referendum pada 16 April 2017 Turki melakukan amandemen yang diinisiasi oleh Erdoğan sebagai penguasa Parlemen Turki saat itu. Dalam referendum ini terdapat 18 poin perubahan yang mana secara garis besar perubahan-perubahan yang dilakukan adalah demi penyesuaian untuk melakukan perubahan dari sistem parlementer ke sistem presidensial. Namun kemudian referendum ini mendapat banyak penolakan dan kritikan dari sebagian kalangan, terutama dari kelompok penantang yakni partai *Cumhuriyet Halk Partisi* (CHP) dan *Halkların Demokratik Partisi* (HDP). Kedua partai ini menganggap dengan hasil perubahan sistem pemerintahan dari referendum ini akan mengarahkan Turki menjadi pemerintahan yang diktator. Ini terjadi karena pada poin perubahan ke-7 disahkan bahwa presiden diperbolehkan menjadi bagian dari partai politik yang mana dalam aturan sebelumnya hal ini tidak diperbolehkan. Sehingga dengan perubahan ini membawa keuntungan bagi Erdoğan jika memenangkan pemilihan berikutnya. Dengan keberhasilan dari perubahan sistem pemerintahan ini, banyak akademisi yang mengkhawatirkan Turki akan kembali mengadopsi kepemimpinan politik terpusat seperti zaman Mustafa

Kemal, mengingat jabatan yang telah dinikmati Erdoğan sejak tahun 2003 sebagai perdana menteri (Karim and Basyrar 2018).

Gambar 8 Political Settlement Turki Tahun 2015 - 2023



Sumber: Pola Pribadi

Pada 2018 ini juga para kelompok penantang koalisi dominan mulai berpikir ulang untuk menemukan cara demi menggulingkan posisi kelompok dominan saat ini yang diduduki oleh AKP sebagai pemegang otoritas tertinggi dan memiliki legitimasi kuat dalam mengkooptasi militer dan birokrasi dalam menjaga posisinya saat ini. Selain itu juga AKP mengkooptasi kelompok konservatif Kurdi yakni HÜDA-PAR untuk mendukung mereka dalam menjaga raihan suara pada PEMILU mendatang. Akhirnya menuju PEMILU 2023, para penantang kelompok dominan terbesar yakni CHP dan HDP melakukan hubungan komunikasi untuk merebut suara kelompok dominan. HDP kemudian menyatakan sikap untuk memberi dukungan terhadap pencalonan Kemal Kılıçdaroğlu dalam PEMILU 2023.

Memasuki tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, tidak ada lagi komunikasi baik yang terjalin antara Kurdi dengan pemerintahan Erdoğan. Dalam sebuah jurnal

Toni Alaranta (2018) menyebutkan bahwa ini merupakan tanda kebuntuan atas terbentuknya kembali perdamaian dari pihak pemerintah dan Kurdi. Disebutkan bahwa hal yang paling nyata terjadi di depan mata adalah pelemahan terhadap kelompok Kurdi dengan penangkapan-penangkapan anggota partai politik Kurdi, walikota HDP di distrik-distrik Kurdi diturunkan dan diganti secara paksa dengan walikota pilihan pemerintah, operasi-operasi militer yang ditujukan kepada militan PKK kemudian dengan banyaknya pimpinan HDP yang dipenjara, ini semua terlihat nyata dibanding dengan prospek proses solusi politik dengan terbentuknya perjanjian damai antara pemerintah dan Kurdi (Alaranta 2018).

2.2 Koalisi Partai dan Aktor dalam Perpolitikan Turki Kontemporer

Dalam dinamika politik Turki saat ini sebetulnya masih belum ada perubahan signifikan seperti saat awal Turki merdeka dalam masalah Kurdi ini. Sikap tradisional Turki saat ini yang masih memandang Kurdi bukan sebagai warga Turki sepenuhnya apalagi terhadap kelompok-kelompok separatisnya masih mengakar hingga saat ini. Sikap ini masih mengakar bukan tanpa sebab, ini terjadi karena kelompok-kelompok Kurdi juga masih sering kali melakukan aksi-aksi demonstrasi dan aksi yang menentang kebijakan pemerintah yang dianggap merenggut hak-hak mereka dan juga tuntutan wilayah otonom. Orang-orang Kurdi melakukan ini karena tanah yang mereka anggap sebagai wilayah Kurdistan, saat ini terpecah ke beberapa negara termasuk sebagian besar di Turki setelah Ottoman runtuh. Dengan melihat kondisi ini, penulis mencoba menjabarkan siapa saja aktor-aktor yang memiliki peran dalam pengambilan kebijakan dan menentukan kondisi politik di Turki saat ini.

2.2.1 Cumhuri İttifakı (Aliansi Rakyat)

Aliansi yang dalam bahasa Indonesia berarti Aliansi Rakyat ini dipimpin oleh AKP dan MHP sebagai koalisi utamanya yang merupakan penguasa Turki saat ini. Hubungan kedua partai ini bermula setelah terjadinya upaya kudeta pada tahun 2016 lalu. Namun kemudian, baru pada 20 Februari 2018, kedua partai ini membentuk aliansi yang kini disebut sebagai aliansi rakyat. Selanjutnya partai BBP juga bergabung tidak lama setelah aliansi terbentuk. Kemudian protokol resmi Aliansi Rakyat diserahkan kepada Dewan Pemilihan Agung (YSK) pada 4 Mei 2018 yang menandai bahwa aliansi ini sebagai aliansi resmi.

Tentunya meski kemistri antara AKP dan MHP sebagai pimpinan aliansi begitu kuat, namun hubungan mereka tidak selalu sempurna. Seperti menjelang PEMILU daerah pada tahun 2019, terjadi konflik kecil yang terjadi di kubu aliansi ini ketika partai AKP menolak memberikan amnesti umum dari permintaan MHP. Namun akhirnya ini dapat terselesaikan ketika permintaan tersebut diberikan dengan membebaskan tahanan dan narapidana secara sementara selama pandemi covid. Lalu krisis lain juga terjadi ketika Dewan Negara membatalkan tindakan administratif terkait pembacaan sumpah siswa di sekolah dasar. Namun kemudian dalam cara menjaga perolehan suara supaya tetap berada dalam kubu aliansi rakyat, AKP dan MHP membagi wilayah pemilihan mereka. Seperti pada tahun 2019, mereka tidak melakukan pemilihan di kota-kota yang sama sehingga tidak terjadi tumpang tindih suara. Ini juga merupakan strategi mereka untuk melemahkan pihak oposisi, terutama partai HDP untuk telah menentukan sikapnya dalam mendukung Aliansi Bangsa.

Menjelang PEMILU 2023, partai AKP, MHP, dan BBP yang memang sejak awal aliansi terbentuk sudah menegaskan bahwa mereka akan terus bekerja sama bahkan hingga PEMILU 2023. Namun kemudian menjelang PEMILU 2023, partai-partai lain pun telah menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan blok aliansi seperti YRP dan DSP sesaat sebelum penyerahan daftar calon ke Dewan Pemilihan Umum. Selain itu beberapa anggota HÜDA-PAR juga mendukung pencalonan Erdoğan dari Aliansi Bangsa walau HÜDA-PAR sendiri tidak bergabung dengan aliansi. Hal ini terjadi karena MHP sendiri keberatan jika HÜDA-PAR bergabung dengan aliansi utama. Akhirnya dalam protokol resmi yang diserahkan kepada Dewan Pemilihan Tinggi, hanya HÜDA-PAR yang dikecualikan (Beriş 2023).

Sebagai koalisi partai utama di Turki dan pro pemerintah, mereka tentunya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi politik di negaranya. Dalam konteks kelompok Kurdi, mereka kerap kali membentuk retorika negatif terhadap partai politik Kurdi yang tidak sepaham seperti HDP. Partai tersebut selalu dituduh berafiliasi dengan kelompok teroris PKK untuk memecah Turki. Kemudian anggota-anggota hingga pimpinan partai ini pun turut ditangkap dan dipenjarakan tanpa ada bukti yang kuat, bahkan pada 2021 pun HDP diancam akan dibubarkan karena dituduh berafiliasi dengan PKK.

Namun kemudian hal menarik terjadi ketika HÜDA-PAR sebagai partai Kurdi yang pro dengan pemerintah namun tidak sepaham dengan HDP dapat dirangkul oleh pimpinan aliansi tersebut walau bahkan kehadiran HÜDA-PAR ini ditentang oleh anggota koalisi lainnya. Ini terjadi karena kepentingan HÜDA-PAR sama dengan Erdoğan selaku pimpinan aliansi. Diketahui bahwa, Erdoğan yang berideologi islam

konservatif mencoba menarik dukungan dari orang-orang Kurdi melalui HÜDA-PAR sebagai partai Islam garis keras. Sehingga tentunya ini akan mempengaruhi perolehan suara pada pemilihan di Turki. Tentunya ini merupakan strategi dari AKP untuk merebut suara oposisi yang juga mendapat dukungan dari HDP dengan basis pendukung mayoritas dari orang-orang Kurdi (Daily Sabah 2023).

Tekanan yang dilakukan oleh pemerintah Turki terhadap HDP yang merupakan partai pro Kurdi terbesar telah dilakukan sejak gencatan senjata antara PKK dan pemerintah runtuh pada 2015. Kemudian tekanan yang dilakukan meningkat sejak adanya upaya kudeta yang gagal pada 2016 (BBC 2021). Setelah berbagai retorika dan tuduhan serius yang dibentuk oleh AKP dan koalisinya untuk melemahkan HDP. Pemerintah yang saat ini dalam kendali AKP menggunakan otoritasnya melalui Mahkamah Konstitusi untuk mencoba menutup partai oposisi terbesar kedua ini dan melarang sekitar 450 anggotanya untuk berpolitik dengan dugaan adanya hubungan dengan militan PKK (Akin and Scammell 2023). Lebih lanjut, menjelang PEMILU 2023, HDP kembali menghadapi tuduhan dengan militan PKK oleh pemerintah. Melalui Mahkamah Konstitusi Ankara, mereka membekukan dana kas partai HDP yang akan digunakan untuk kampanye pemilu (Foster 2023).

2.2.2 Millet İttifak (Aliansi Bangsa)

Aliansi yang dalam bahasa Indonesia berarti Aliansi Bangsa ini merupakan aliansi oposisi yang berdiri pada 2018 yang diinisiasi oleh ketua CHP yakni Kemal Kılıçdaroğlu setelah Turki mengizinkan adanya aliansi dalam PEMILU. Namun pada Oktober 2021 baru pertama kali para pemimpin dari enam partai bertemu yang sekarang menjadi koalisi terdiri dari enam partai yang disebut sebagai “Table of Six”

yang berkoalisi untuk untuk menantang penguasa kuat Turki saat ini yaitu Presiden Recep Tayyip Erdoğan. Aliansi yang dipimpin oleh partai CHP bersama lima partai lainnya seperti İYİP, SP, DP, DEVA, GP telah merapatkan barisan untuk menghadapi Aliansi Rakyat yang dikuasai oleh AKP dan MHP dalam pemilihan presiden dan parlemen tahun 2023 (Esen 2022).

Dalam persiapannya menghadapi PEMILU 2023, Aliansi Bangsa membentuk sembilan kelompok kerja yang terdiri dari masing-masing perwakilan partai koalisi pada 2 Oktober 2022. Tugas dari sembilan kelompok kerja ini adalah untuk mempersiapkan dokumen kebijakan bersama yang nantinya akan menjadi program pemerintah Aliansi Bangsa jika menang dalam pemilihan. Kemudian hasil kerja mereka ini akhirnya menghasilkan program bersama yang dipublikasikan pada tanggal 30 Januari 2023 yang dimuat dalam 200 halaman. Secara garis besar, terdapat 3 pilar yang diusung oleh Aliansi Bangsa: pemulihan supremasi hukum, penanganan krisis ekonomi, dan perumusan kebijakan luar negeri baru.

Pertama, pada pilar pemulihan supremasi hukum, “Table of Six” memperkenalkan sistem yang mereka sebut dengan “Strengthened Parliamentary System”. Para pimpinan enam partai tersebut mencoba melakukan transisi Turki ke SPS dengan maksud mencapai konsensus yang lebih luas jika mereka menang dalam pemilihan. Dengan kata lain, mereka berjanji bahwa mereka tidak hanya akan melakukan penghapusan pada sistem *hyper-presidensial* atau pemerintahan satu orang, namun juga untuk membentuk model parlementer yang baru. Selain rencana untuk menerangkan SPS atau model parlementer baru, hasil kerja sembilan kelompok yang dibentuk, menghasilkan paket amandemen konstitusi seperti pemulihan sistem

peradilan yang independen dan tidak memihak, reformasi lembaga-lembaga publik, serta pencegahan sistematis terhadap pelanggaran HAM.

Kedua, penanganan krisis ekonomi, dengan melihat isu hiperinflasi di Turki saat ini menjadi faktor yang mempengaruhi pemilih pada PEMILU 2023 yang akan datang. Tentunya permasalahan ekonomi ini harus dihadapi bukan hanya pada pemerintahan yang sekarang, namun juga pada pemerintahan yang baru. Namun Aliansi Bangsa sebagai pihak oposisi nyatanya belum memiliki solusi bersama untuk menghadapi permasalahan ini. Namun pada 13 Juni 2022, “Table of Six” mendeklarasikan “Institutional Reform Commission”, yang berisikan enam pihak yang berkomitmen menjadikan proses pengambilan kebijakan dalam bidang ekonomi, keuangan, kebijakan moneter dan stabilitas harga lebih terlembaga dan inklusif bagi para pemangku kepentingan, dengan penekanan pada kesetiaan mereka terhadap otonomi Bank Sentral Turki. Sejalan dengan itu, pada tanggal 30 Januari 2023, mereka juga membuat kebijakan bersama dengan menekankan pada restrukturisasi dan penguatan institusi ekonomi. Mereka berjanji untuk membentuk sebuah komite yang mengawasi keadaan perekonomian di Turki.

Ketiga, perumusan kebijakan luar negeri baru, dalam perumusan kebijakan bersama aliansi ini tidak terlalu spesifik dalam menggambarkan perubahan kebijakan luar negeri Turki kecuali pembahasan mengenai hubungan Turki dengan Mediterania Timur, Siprus, dan Yunani. Dalam kebijakan bersama yang dibuat, aliansi ini juga berjanji untuk memprioritaskan diplomasi dan perundingan multilateral untuk menangani masalah-masalah tersebut. Kemudian kebijakan bersama juga berjanji

untuk mempertimbangkan kembali perjanjian Turki dengan Uni Eropa dalam penerimaan kembali para pencari suaka (Şar 2023).

Dalam konteks perpolitikan Kurdi di Turki, aliansi ini dapat dikatakan tidak secara terbuka mengakui hubungannya dengan HDP. Ini terjadi karena terdapat isu bahwa HDP merupakan perpanjangan tangan dari PKK sebagai kelompok teroris yang dilarang. Namun kemudian HDP sendiri tetap mendukung CHP dan aliansi karena tidak mungkin memilih Erdoğan dari AKP sebagai presiden. HDP memutuskan untuk mendukung Kemal karena memang kandidat yang diinginkan yakni Selahattin Demirtaş tidak ada karena ditangkap sejak 2016 oleh otoritas Turki tanpa alasan yang jelas.

Aliansi Bangsa tidak ingin mengakui secara terbuka atas dukungan yang diberikan oleh HDP adalah karena pihak aliansi takut atas sikap Erdoğan yang akan menyerang aliansi juga dengan tuduhan berhubungan dengan teroris. CHP sendiri sebagai pimpinan aliansi tentu sangat membutuhkan dukungan ini mengingat posisi Erdoğan yang sangat kuat dalam perebutan suara. Namun banyak pionir partai İYİ yang tidak setuju pengusungan Kemal Kılıçdaroğlu dengan dukungan HDP. Ini terjadi karena partai nasionalis seperti İYİ menuduh bahwa HDP bersimpati dengan PKK sehingga ini menyebabkan krisis legitimasi dalam kubu aliansi (AYDIN 2023).

2.2.3 Emek ve Özgürlük İttifakı (Aliansi Buruh dan Kebebasan)

Aliansi yang dalam bahasa Indonesia berarti Aliansi Buruh dan Kebebasan Sayap Kiri merupakan aliansi yang secara resmi dibentuk pada 25 Agustus 2022 dan diketuai oleh HDP. Anggota aliansi saat ini yaitu Partai Rakyat Demokratik (HDP), Partai Pekerja (TİP), Partai Buruh (EMEP), Partai Gerakan Buruh (EHP), Kebebasan

Sosial Partai (TÖP) dan Federasi Majelis Sosialis (SMF). Adapun dibentuknya aliansi ini dilatarbelakangi oleh AKP yang merubah pandangannya menjadi lebih nasionalis dan mengakhiri *Kurdish Opening* pada tahun 2015. Diketahui bahwa HDP dijadikan salah satu target kriminalisasi utama dan stigmatisasi rezim pertahanan. Sistem peradilan yang tidak lagi adil, selain memenjarakan mantan pimpinan HDP, Selahattin Demirtaş dan Figen Yüksekdağ pada tahun 2016, namun juga anggota mereka yang menjadi walikota dan terpilih secara demokratis pada pemilihan 2019 juga hampir semuanya dicopot dan digantikan oleh walikota baru utusan pemerintah (Reynolds 2023).

Dalam memperjuangkan hak-hak Kurdi, tentunya kelompok politik ini tidak memulainya baru-baru ini. Namun sejak awal Turki merdeka, pergerakan-pergerakan untuk melakukan tuntutan hak Kurdi sudah ada sejak saat itu. Dalam konteks kontemporer, pergerakan kelompok Kurdi ini sudah tidak lagi mengutamakan gerakan bersenjata. Melalui partai-partai pro Kurdi yang dibentuk, mereka sudah mulai “menantang” negara untuk menyuarakan kepentingan mereka. Seperti HDP yang kemudian mampu bersaing dalam pemilihan di Turki untuk pertama kalinya sebagai partai pro Kurdi untuk hadir dalam perpolitikan di Turki. HDP merupakan partai oposisi terbesar kedua setelah CHP dan memiliki basis pendukung mayoritas orang-orang Kurdi. Sebagai partai oposisi terbesar kedua, tentunya partai arus utama tidak dapat menyepelkan kehadiran mereka. AKP sebagai penguasa Turki saat ini “menggunakan” HÜDA-PAR untuk merebut suara Kurdi dari HDP. Alasannya adalah sejak 2018 HDP telah menentukan sikapnya untuk mendukung Kemal sebagai saingan Erdoğan, sehingga mau tidak mau Erdoğan selaku pimpinan AKP harus

melakukan manuver politik dengan merangkul HÜDA-PAR sebagai sesama partai dengan basis pendukung Kurdi untuk melemahkan HDP (Tashjian 2023).

2.3 Resolusi Pemerintah Turki terhadap Kelompok Kurdi

Permasalahan terkait isu Kurdi ini telah lama mengakar sejak Turki merdeka menjadi negara republik. Permasalahan yang tiada henti-hentinya dan tidak pernah mencapai kesepakatan hingga saat ini di tahun 2023, di mana kelompok Kurdi menginginkan sebuah wilayah yang otonom karena sering kali mendapat perlakuan diskriminasi ras, di sisi lain pemerintah Turki melihatnya sebagai ancaman disintegrasi negara. Namun kemudian, walau sejauh ini hingga tahun 2023 belum ada kesepakatan yang benar-benar berhasil. Namun dalam perjalanannya, Turki tentunya telah mencoba berbagai cara untuk menyelesaikan masalah Kurdi terlepas dari kepentingannya. Pada jurnal karya Cuma Çiçek (2018) disebutkan ada tiga proses dialog penting dalam sejarah hubungan Turki-Kurdi dalam mencapai perdamaian konflik Kurdi di Turki yang kemudian mempengaruhi transformasi dari kondisi ruang sosial politik Kurdi menjadi lebih luas. Tiga proses tersebut adalah *Imralı Process* (1999-2004), *Oslo Process* (2008-2011) dan *Resolution Process* (2013-2015) (Çiçek 2018).

2.3.1 Imralı Process (1999 - 2004)

Disebut proses Imralı karena lokasi dialog ini terjadi di Imralı tempat Öcalan dipenjara sejak 1999. Proses Imralı ini merupakan kesempatan besar untuk mengakhiri konflik Kurdi di Turki untuk beberapa alasan. Dengan penahanannya di Imralı, membuat Turki akhirnya dapat melakukan diskusi dengan Öcalan di penjara

tersebut. Dengan terjadinya dialog ini, PKK dengan menunjukkan kesetiiaannya pada perintah pimpinannya tersebut akhirnya dapat menarik pasukan bersenjataanya dari perbatasan wilayah Turki, dan secara dramatis ini menurunkan konflik yang terjadi antara tahun 1999-2004. Selain itu PKK juga merevisi tujuan ideologi politiknya dan metode perjuangannya dengan lebih mengedepankan, resolusi politik internal, cara yang damai, dan dialog serta negosiasi dengan otoritas Turki. Kemudian dalam konteks yang lebih luas, Eropanisasi juga membawa dampak penting untuk kedua belah pihak.

Namun terlepas dari kesepakatan yang dibuat, proses Imrali menemui kegagalannya karena beberapa alasan. Adapun alasan proses Imrali gagal adalah karena perpecahan di internal PKK, keluarnya beberapa anggota PKK termasuk yang berada di kursi dewan kepresidenan membuat proses Imrali perlahan terkikis (Çiçek 2018).

Dalam proses Imrali tidak banyak jurnal literatur yang membahas dialog ini secara mendetail. Sehingga penulis hanya dapat menjelaskan secara garis besar mengenai proses Imrali ini.

2.3.2 Oslo Process (2008 - 2011)

Sebelum terjadinya *Oslo Process*, sudah terjadi pertemuan antara Dewan Keamanan Nasional Turki (MGK) dengan PKK pada tahun 2007. Pertemuan ini memperkenalkan beberapa reformasi mengenai hak-hak budaya warga negara. Di sini terlihat bahwa AKP pada 2007 mulai memperkenalkan kebijakan negosiasi baru dan kebijakan pengakuan yang lebih tegas. Mengingat AKP memperoleh hampir 50% suara pada PEMILU 2007, AKP mungkin merasa cukup mampu untuk mencoba cara

baru dalam menangani masalah Kurdi, karena memang kebijakan lama terbukti tidak dapat bertahan.

Pada tahun 2008 Ahmet Davutoğlu, penasihat utama Erdoğan untuk urusan luar negeri dan Murat Özçelik utusan khusus Turki untuk Irak, melakukan kunjungan ke Masoud Barzani presiden Pemerintah Daerah Kurdistan (KRG) dan kunjungan ini sebagaimana disarankan oleh F. Stephen Larrabee dan Gönül Tol “untuk memulai serangkaian kontak formal dalam hubungan antara Ankara dan Erbil, khususnya di bidang ekonomi”. Kemudian kebijakan penahanan Kurdi selama beberapa dekade Turki, sekarang sudah berakhir. Diketahui kebijakan ini membuahkan hasil untuk pertama kalinya di tingkat daerah. Lalu tidak lama setelah keberhasilan ditingkat daerah, kebijakan ini juga membuahkan hasil di tingkat domestik serta terungkap juga bahwa beberapa pejabat negara melakukan dialog dengan PKK dan mereka mengadakan beberapa kali pertemuan di Oslo mulai September 2008.

Memasuki tahun 2009 dengan melihat kemajuan yang terjadi dalam pertemuan antara negara dan PKK, semua aktor yang terlibat dalam *Kurdish Question* mulai meningkatkan posisi mereka. Seperti Kepala Staf Militer Turki yang menekankan bahwa tentara Turki akan mendukung pengakuan hak budaya di tingkat individu. Kemudian ia juga mengumumkan bahwa tentara lebih memilih melikuidasi PKK daripada membubarkannya. Di kesempatan yang sama juga ia menyatakan bahwa istilah bangsa Turki telah disalahpahami dan bahwa bangsa Turki didefinisikan dalam istilah kewarganegaraan dan terdiri dari setiap orang yang telah membangun Republik Turki. Senada dengan pertanyaan itu, AKP juga mulai mengambil langkah yang sama bahkan lebih penting. Pada awal tahun 2009, lembaga

penyiaran publik TRT telah meluncurkan saluran TV dalam bahasa Kurdi 24 jam bernama TRT 6. Serta, Dewan Pendidikan Tinggi (YÖK) telah membuat kebijakan untuk mendirikan departemen bahasa dan sastra Kurdi di universitas. Dalam sejarah Turki, ini merupakan gerakan paling radikal dalam alur pengakuan sejati dari identitas Kurdi di Turki karena belum ada kebijakan seterbuka ini sebelumnya.

Dalam sebuah wawancara presiden Abdullah Gül saat perjalanannya ke Iran pada Maret 2009 menyatakan bahwa isu Kurdi adalah persoalan yang sangat penting dalam politik Turki, dan ia menyebutkan bahwa hal-hal baik akan segera terjadi. Tentunya ini memperlihatkan bahwa Turki siap untuk mengubah cara pandang tradisionalnya untuk lebih terbuka dalam melihat *Kurdish Question* (tuntutan Kurdi) dan cara pandang baru ini pun juga disetujui oleh MGK. Kemudian PKK juga mengumumkan gencatan senjata setelah dilaksanakannya PILKADA pada bulan Maret 2009 menyusul kemenangan dari Partai Masyarakat Demokratik (DTP). Pada Mei 2009 melalui wawancara, Murat Karayölan ketua Asosiasi Komunitas Kurdistan (KCK) juga menyatakan bahwa PKK siap untuk melakukan dialog dengan tujuan akhir perlucutan senjata.

Dari proses-proses perdamaian ini hingga pada pertengahan tahun 2009, dimulai juga apa yang disebut sebagai *Kurdish Opening* atau program AKP untuk menyelesaikan permasalahan Kurdi. Namun kemudian upaya pemerintahan melalui program ini memicu perdebatan, pihak oposisi pun tidak mendukung upaya ini. Kritik disampaikan oleh CHP yang menganggap bahwa *Kurdish Opening* ini merupakan inisiatif pemerintah yang tidak bertanggung jawab dan CHP melihat bahwa kebijakan ini dapat menimbulkan disintegrasi etnis masyarakat Turki. Selanjutnya MHP pun

menyatakan bahwa *Kurdish Opening* ini dapat membahayakan identitas Turki sebagai negara kesatuan. Namun seakan hanya angin lalu, AKP dan PKK dengan tegas tetap melanjutkan program *Kurdish Opening* ini.

Akhirnya terjadi kemunduran dan memicu kembali bentrokan antara PKK dan aparat, yang pada 7 Desember 2009 PKK membunuh 7 tentara dalam serangan di Rejadiye, Tokat. Buntut dari aksi ini, Mahkamah Konstitusi (AYM) melarang DTP dan deputi DTP menarik diri dari Majelis Nasional. Program *Kurdish Opening* dari 2009-2011 masih belum jelas, karena tidak adanya isu akan terjadinya kesepakatan Turki-Kurdi. Walau tidak menemui kejelasan dari upaya ini, di sisi lain Öcalan sedang menyiapkan peta resolusi penyelesaian Turki-Kurdi. Dalam peta resolusi ini Öcalan mengusulkan penyelesaian masalah Kurdi atas dasar prinsip-prinsip “negara demokratis”, “republik demokratik”, “konstitusi demokratis”, dan “tanah air bersama”. Namun kemudian pemerintah tidak memberikan respon atas usulan ini dan ini juga menunjukkan bahwa pemerintah tidak bersedia untuk meneruskan resolusi dan akhirnya memicu konflik kembali. Meski timbul lagi serangan oleh PKK pada 1 Juni 2010, Öcalan menyerukan untuk tetap melakukan gencatan senjata. Akhirnya gencatan senjata pun kembali terbentuk selama 40 hari dan kemudian diperpanjang hingga PEMILU Juni 2011.

Selanjutnya saat gencatan senjata masih berlangsung, Öcalan menyiapkan dan menyerahkan peta resolusi yang baru kepada negara. Terdapat tiga protokol dalam peta resolusi baru tersebut yaitu “Draf Prinsip untuk Solusi Demokratis dari Masalah Sosial Utama di Turki,” “Draf untuk Perdamaian yang Adil dalam Hubungan antara Negara dan Masyarakat,” dan “Draf Rencana Aksi untuk Solusi Demokratis dan Adil

dari Pertanyaan Kurdi.”. Melalui pembicaraan Oslo, baik PKK maupun pejabat negara menyetujui dari usulan protokol yang baru ini dan berjanji akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan setelah PEMILU 12 Juni 2011.

Namun setelah PEMILU 2011 usai dengan hasil BDP memenangi setengah suara di provinsi Kurdi, dan AKP menerima setengah suara di Turki membuat AKP tidak terlalu senang. AKP selanjutnya tidak terlalu bergairah untuk melanjutkan proses perdamaian. Para pemimpin PKK menyebut bahwa negara menghentikan proses Oslo setelah pemilihan dan menolak untuk menandatangani protokol yang sebelumnya sudah disetujui oleh kedua belah pihak (Yeğen 2015).

Dengan sikap negara ini terhadap peta politik baru, menandai juga proses Oslo yang gagal. Ini terjadi karena pemerintah AKP terlalu fokus pada pelucutan senjata KCK dan membatasi penyelesaian masalah Kurdi pada pengakuan sebagian hak budaya individu. Di lain sisi, KCK menganjurkan bahwa kekuasaan dan berbagi hak budaya secara kolektif dalam kerangka otonomi yang demokratis. Selain itu, partai politik pro Kurdi yang legal juga tidak diikutsertakan dalam proses dialog ini. Sehingga dengan adanya kekurangan-kekurangan ini membuat Proses Oslo menemui kegagalannya untuk mencapai kesepakatan damai (Çiçek 2018). Hal ini ditandai dengan kembalinya konflik bersenjata dan PKK melakukan penyerangan dengan apa yang disebut Perang Revolusi Rakyat di Silvan sebulan pasca pemilihan pada 14 Juni 2011.

2.3.3 Resolution Process (2013 - 2015)

Setelah gagalnya proses Oslo, perkembangan selanjutnya dari proses perdamaian Turki-Kurdi dibentuk sebuah dialog baru yang disebut *Resolution*

Process. Erdoğan mengumumkan pada 12 Februari 2013 bahwa dia siap untuk menerima semua resiko politik demi mencapai perdamaian. Kelompok AKP di parlemen juga mengesahkan undang-undang yang membuat bahasa Ibu dapat digunakan pada pembelaan di pengadilan. Hal ini juga diikuti dengan pembebasan 8 tentara dan pegawai negeri Turki yang ditawan oleh PKK di Kurdistan Irak.

Melalui kunjungan yang dilakukan BDP di Imralı dan markas PKK di Kandil, Öcalan menyampaikan proposal barunya untuk mencapai perdamaian. Akhirnya pada 21 Maret 2013, Öcalan kembali menyusun peta resolusi untuk ketiga kalinya untuk mencapai hasil negosiasi terbaik antara Turki-Kurdi dan kemudian diumumkan ke publik pada 21 Maret 2013 saat perayaan Newroz di Diyarbakir yang saat itu sangat ramai dihadiri oleh ratusan ribu orang Kurdi.

Dalam pesan yang disampaikan tersebut Öcalan secara terbuka menyampaikan bahwa era perjuangan Kurdi melalui gerakan bersenjata telah usai dan kini memasuki era baru yaitu era melalui perjuangan politik. Öcalan juga menyerukan untuk melakukan gencatan senjata dan melakukan penarikan pasukan PKK ke Kurdistan Irak. Sejalan dengan perintah pimpinannya tersebut. PKK kemudian mengumumkan gencatan secara sepihak pada 23 Maret 2013. Sadullah Ergin Menteri Kehakiman dan tokoh sentral dalam proses perdamaian kali ini menyatakan bahwa proses ini terdiri dari tiga fase: Gencatan senjata dan penarikan PKK, demokratisasi, serta terakhir perlucutan senjata dan normalisasi.

Namun setelah sedikit proses ini berjalan, pada September 2013 PKK terpaksa memberhentikan penarikan pasukannya sementara karena pemerintah tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan sesuai perjanjian yang dibuat. Pemerintah malah

membangun instalasi militer baru di sekitaran lokasi penarikan militan PKK, lalu pemerintah juga membangun pangkalan militer berbenteng dan bendungan di rute PKK biasa menarik pasukannya ke Irak. Namun walau pemerintah mengambil sikap egois, PKK tetap pada pendiriannya untuk tetap menjaga gencatan senjata tanpa melakukan penyerangan.

Usaha PKK dalam menjaga gencatan senjata membuahkan hasil. Setelah PILKADA 2014 di Turki rampung, AKP mengubah undang-undang MİT dengan memberi kewenangan kepada MİT untuk bertemu dengan apa yang disebut oleh mereka sebagai “organisasi teroris” dan mereka yang terlibat di dalam penjara. Perubahan undang-undang ini juga membuat narapidana KCK dibebaskan pada akhir tahun 2014.

Dalam proses resolusi ini juga membawa AKP melangkah lebih radikal, saat itu AKP memberlakukan kerangka undang-undang pada bulan Juni 2014 untuk proses penyelesaian konflik berjudul “Undang-Undang untuk Mengakhiri Teror dan Memperkuat Integrasi Sosial”. Kerangka undang-undang ini membuat pemerintah dan birokrasi memiliki wewenang untuk menentukan cara dalam menyelesaikan konflik dan memastikan integrasi sosial serta memberi wewenang kepada pejabat untuk menghubungi “teroris” (Yeğen 2015).

Namun pada akhirnya *Resolution Process* yang dibentuk pun gagal seperti proses-proses dialog sebelumnya. Gagalnya upaya ini karena kedua belah pihak tidak dapat mencapai konsensus dalam proses negosiasi (Çiçek 2018). Gagalnya *Resolution Process* tentunya menandai titik balik sikap lama dari kedua belah pihak untuk kembali saling berkonflik. Pada Juli 2015 gencatan senjata yang telah dibuat pun

runtuh yang menyebabkan eskalasi konflik dari kedua belah pihak terus naik. Pertempuran sejak 2015 ini telah memakan banyak korban jiwa sebanyak 4.397 orang, dan merakatakan sebagian kota mayoritas Kurdi dan menggusur sekitar 350.000 warga sipil (Hoffman 2019). Ini menjadi konflik yang terburuk dan menjadi puncak konflik sejak Erdoğan menjabat sebagai pemimpin di Turki. Gagalnya kesepakatan ini juga memicu kudeta yang kembali terjadi pada 2016.

BAB 3

ANALISIS HUBUNGAN KELOMPOK KEPENTINGAN POLITIK KURDI DAN PEMERINTAH TURKI DALAM PERSOALAN KURDI DITINJAU MELALUI POLITICAL SETTLEMENT

Pada bab ini, penulis akan mengkorelasikan antara *Political Settlement* terhadap kondisi politik di Turki dalam persoalan Kurdi untuk dapat menggambarkan peta politik dari aktor-aktor yang ada supaya rumusan masalah yang dibuat dapat terjawab. Pembahasan akan dimulai pada sub bab 3.1 untuk menganalisis aktor-aktor yang termasuk ke dalam koalisi dominan dan juga dua lapisannya. Selanjutnya pada sub bab 3.2 penulis akan menganalisis aktor-aktor yang termasuk ke dalam koalisi penantang. Terakhir pada sub bab 3.3 penulis akan menganalisis aktor-aktor yang dikecualikan.

3.1 Political Settlement Dominant Coalition

Melihat peta politik Turki yang ada sekarang, aktor yang paling menonjol dan sudah diketahui oleh semua orang sekarang tentunya adalah AKP dan pemimpinnya yang juga merupakan presiden Turki sekarang, Recep Tayyip Erdoğan. Beliau juga merupakan seorang pemimpin dari Aliansi Rakyat yang di dalamnya terdapat partai-partai lain yang juga mendukung Erdoğan untuk menjadi presiden pada pemilihan-pemilihan sebelumnya. Namun jika membicarakan mengenai aliansi tentunya ini tidak akan cukup mudah bagi Erdoğan untuk mendapatkan posisi seperti sekarang, terlebih setelah terjadinya percobaan kudeta pada 2016 yang membuat posisi Erdoğan saat itu cukup kritis.

Selain adanya aktor-aktor politik dalam koalisi Aliansi Rakyat, penulis meneliti dari berbagai sumber bahan bacaan ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan, bahwa selain partai politik yang ada di dalam aliansi, ada juga aktor politik lain di luar aliansi yang memiliki pandangan yang sama terhadap isu Kurdi. Di sisi lain aktor-aktor ini juga tentunya memiliki kepentingannya sendiri sebagai alasan mengapa mereka memiliki pandangan yang sama walau tidak termasuk di dalamnya. Maka dari itu Ali Riaz (2017) mengemukakan dalam konsep *Political Settlement* bahwa terdapat dua lapisan di dalam lingkaran koalisi dominan yaitu *Inner Circle* dan *Outer Circle*.

3.1.1 *Inner Circle*

Sebagai aktor politik yang ingin menjalankan kekuasaan dan menentukan arah gerak dalam konteks negara, mereka harus beradap di posisi *Inner Circle* ini. Dengan berada dalam lingkaran ini akan membawa mereka lebih dekat terhadap akses sumber daya untuk dapat menjalankan kekuasaan sesuai kehendaknya. Dengan memiliki legitimasi yang kuat, aktor yang berada di posisi ini dapat menyingkirkan lawannya atau pihak yang dirasa dapat mengancam posisi lingkaran dominan dengan menggunakan kekuatan negara.

Dalam konteks studi kasus penelitian ini, aktor yang berada di posisi *Inner Circle* ini adalah AKP bersama Aliansi Rakyat-nya. Dengan legitimasi yang kuat sebagai penguasa negara, dengan akses mereka terhadap sumber daya kekuasaan sekarang, mereka mampu dengan bebas melakukan apapun demi melanggengkan kepentingannya dalam dinamika politik Turki kontemporer. Seperti pimpinan HDP yang dipenjara, pencopotan paksa walikota HDP terpilih yang kemudian digantikan

oleh walikota yang ditunjuk pemerintah, menunjukkan sikap otoriter dari kelompok *inner circle* yang mampu menggunakan kemampuan negara untuk menciptakan masyarakat yang homogen. Seharusnya pendelegasian kekuasaan kepada administrasi lokal akan menjadi lebih relevan untuk menyelesaikan permasalahan Kurdi saat ini. Namun ini tentunya ini akan bertentangan dengan kepentingan dari AKP untuk memusatkan kekuasaannya ditangan presiden, dan dengan digandengnya MHP ultranasionalis sebagai mitranya, akan semakin menunjukkan kebuntuan dalam menyelesaikan permasalahan Kurdi (Alaranta 2018).

Selanjutnya adalah setelah perubahan sistem pemerintahan di Turki pada 2017, membuat pemerintah memiliki kemampuan untuk dapat dengan mudah mengintervensi sistem peradilan. Dalam sistem presidensial juga, membuat seorang presiden terpilih dapat tetap menjadi anggota partai, yang membuat semua keputusan presiden bukan terbentuk dari kepentingan masyarakat namun juga dipengaruhi oleh kepentingan partai. Kemudian birokrat yang terkooptasi ke dalam kepentingan partai AKP saat ini yang seharusnya bertindak untuk kepentingan seluruh bangsa, akhirnya berubah menjadi komisariss partai dalam mekanisme birokrasi. Akhirnya birokrat seperti Presiden RTÜK, Presiden Bank Sentral, Presiden Badan Statistik Turki dan rektor universitas, dapat menerapkan keputusan sewenang-wenang Erdoğan yang kejam meskipun ada hukum yang berlaku.

Dengan sistem presidensial ini juga memunculkan dikotomi antara pendukung AKP dan bukan pendukung AKP yang dianggap sebagai warga negara yang tidak diinginkan. Kemudian dengan sistem saat ini juga membuat birokrat negara melihat bahwa tidak ada salahnya jika mereka melanggar kerangka hukum negara demi

menunjukkan kesetiaan mereka terhadap presiden yang dipilih AKP. Dengan aparaturnegara yang terkooptasi dengan partai ini akhirnya membentuk sebuah struktur yang disebut negara partai, Dengan keadaan ini membuat Turki mengalami erosi demokrasi yang mengakibatkan birokrat tidak lagi bekerja sesuai undang-undang namun sesuai dengan kepentingan partai (Özpek 2022).

Dengan legitimasi yang kuat, anggapan yang dibentuk AKP bahwa HDP merupakan perpanjangan tangan dari PKK dapat tersampaikan dengan baik kepada oposisi dan juga masyarakat Turki. Sehingga tindakan pemerintah yang mengkriminalisasi dengan melakukan tindakan-tindakan represif, tidak terlalu menjadi persoalan bagi mayoritas masyarakat Turki. Maka pemerintah dapat dengan bebas melakukan apapun untuk melemahkan HDP.

Adapun tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah terhadap HDP dari tahun 2018-2023 adalah dengan melakukan penangkapan kepada anggota-anggota HDP dengan tuduhan bersimpati dengan terorisme. Mengancam akan menutup partai HDP karena dianggap memiliki hubungan dengan PKK. Kemudian melakukan pembekuan dana hibah partai. Namun dari semua tuduhan-tuduhan ini tidak ada bukti nyata bahwa mereka memiliki hubungan langsung dengan PKK dengan sifat simbiosis mutualisme. Adapun bahwa mereka memiliki hubungan hanya dalam ikatan kekeluargaan dan basis ideologi yang sama, namun tidak ada bukti konkrit bahwa mereka saling bekerjasama dalam melawan pemerintah. dalam konteks persoalan Kurdi.

Sebagai kelompok dominan Turki saat ini serta memiliki legitimasi yang kuat atas pandangan mereka terhadap Kurdi dan juga kemampuan mereka yang luar biasa

dalam mengkooptasi serta mengendalikan birokrasi dan militer sebagai sumber daya negara sebagai alat dalam pelemahan-pelemahan kelompok nasionalis Kurdi, dapat menempatkan mereka sebagai kelompok dominan *inner circle*. Pandangan mereka terhadap keutuhan negara Turki menjadi prioritas, sehingga membentuk jiwa nasionalisme yang kuat. Ini terbukti dengan contoh-contoh kasus sebelumnya yang telah dipaparkan. Dengan kebijakan-kebijakan dan tindakan yang dilakukan menjadikan mereka sebagai kelompok nasionalis paling kuat di Turki.

3.1.2 *Outer Circle*

Selain *Inner Circle* sebagai “aktor paling berkuasa” dalam konteks *dominant coalition Political Settlement*. Ada juga *Outer Circle* sebagai “Aktor pendukung” yang memiliki pandangan yang sama dengan *Inner Circle* namun tidak memiliki *power* sebesar aktor *Inner Circle* dalam membangun pengaruh.

Dalam konteks perpolitikan Turki kita semua pastinya mengetahui bahwa aktor-aktor mana saja yang bertentangan pemerintah atau dengan kata lain AKP dan Aliansi Rakyat sebagai penguasa Turki saat ini. Partai CHP dan Aliansi Bangsa yang menjadi lawan AKP dalam perebutan suara dalam pemilihan di Turki akan dianggap sebagai rival karena bertarung dalam peraihan suara. Namun sejalan dengan Ali Riaz (2020) bahwa hubungan mereka yang sebagai kelompok penantang dan dominan dapat didefinisikan ulang dan dinegosiasikan ulang, membawa kondisi yang berbeda ketika situasi ini dilihat melalui konteks persoalan Kurdi.

Dengan melihat kepentingan mereka terhadap nilai-nilai Turki yang sebetulnya tidak berbeda jauh dengan kelompok *Inner Circle*, membuat CHP dan Aliansi Bangsa menempati peran sebagai *Outer Circle* dari kelompok dominan.

Meskipun CHP dan Aliansi Bangsa selalu menggaungkan nilai-nilai demokrasi sebagai tujuan utamanya, namun dalam kasus Kurdi mereka diklasifikasikan ke dalam *challenger coalition*. Ini terjadi karena dalam konteks Kurdi mereka tidak menyuarakan kepentingan Kurdi dan tidak mendukung pergerakan nasionalis Kurdi seperti aktor politik pro Kurdi lainnya. Kemudian bukti lain bahwa CHP dan Aliansi Bangsa tidak terlalu serius dalam menyelesaikan permasalahan Kurdi adalah tidak adanya inisiasi dalam menyelesaikan masalah Kurdi secara nyata yang tertulis dalam “Teks Perjanjian Kebijakan umum” yang di dalamnya juga membahas mengenai demokrasi. Ini merupakan bukti bahwa perbaikan demokrasi yang dicanangkan oleh Aliansi Bangsa dalam teks tersebut belum tentu dibuat untuk menyelesaikan masalah Kurdi. Dari sini akhirnya menimbulkan banyak kritik dari tokoh-tokoh pergerakan Kurdi seperti Ketua Partai Kebebasan Kurdistan (PAK) Mustafa Özçelik yang menyatakan bahwa Aliansi Bangsa tidak memiliki keinginan untuk menyelesaikan masalah Kurdi yang memang menjadi akar dari permasalahan demokrasi di Turki. Özçelik mencatat bahwa persepektif Aliansi Bangsa terhadap masalah Kurdi terkunci dalam paradigma "Satu negara, satu bangsa, satu tanah air, satu bendera dan satu bahasa", yang menjadi dasar berdirinya republik, dan menyatakan bahwa hal ini didasarkan pada pemahaman yang mengabaikan masalah Kurdi (Günaydın 2023).

Kemudian poin terpentingnya adalah secara tidak langsung ada sebuah kesepakatan yang terjadi antara AKP dan CHP yang membuat kedua partai ini menjadi aktor utama dalam perpolitikan Turki walau di sisi lain mereka juga saling bersaing. Ini tergambarkan ketika HDP sebagai partai terbesar Kurdi tidak mampu mencalonkan kandidat presidennya sendiri pada PEMILU 2023, sehingga mereka

mau tidak mau harus mendukung salah satu partai Turki, yang akhirnya membuat HDP secara tidak sadar terperangkap untuk juga tetap mendukung kelompok dominan untuk tetap berada pada posisinya dan bukan menyuarakan kepentingannya sendiri sebagai kelompok penantang.

Aktor *outer circle* selanjutnya adalah HÜDA-PAR sebagai kurdi konservatif. Mereka walau tidak termasuk ke dalam Aliansi Rakyat, mereka tetap terkooptasi ke dalam kelompok dominan dan kepentingan mereka dapat diakomodasi oleh kelompok dominan yakni AKP sebagai pemerintah Turki sekarang. Ini terjadi karena AKP mampu mengandalkan HÜDA-PAR yang memiliki ideologi sama untuk menjaga raihan suara terhadap AKP. Diketahui HÜDA-PAR juga memiliki pandangan yang berbeda dengan HDP sebagai sesama partai Kurdi. HÜDA-PAR dalam kepentingannya hanya mempermasalahankan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai keislaman, di sisi lain HDP sebagai aktor yang lebih nasionalis. HÜDA-PAR dan HDP pun memiliki sejarah buruk sehingga timbul konflik di antara keduanya (Jacinto 2023).

Selanjutnya yang menjadi aktor *outer circle* adalah militer dan birokrasi. Aktor ini sebenarnya merupakan sumber daya dari negara yang akan selalu digunakan oleh kelompok dominan sebagai alat untuk melemahkan aktor-aktor di luar kelompok dominan yang memiliki pandangan berbeda. Sehingga secara tidak langsung mereka juga terkooptasi ke dalam kelompok dominan. Selain itu mereka juga memiliki peran yang vital terhadap keputusan-keputusan yang dibuat oleh kelompok dominan yang membawa dampak besar pada arah gerak politik di Turki (O'zpek 2019).

3.2 Political Settlement Challenger Coalition

Setelah membahas aktor-aktor dalam *Dominant Coalition*, selanjutnya dalam subab ini penulis akan membahas aktor yang termasuk ke dalam *Challenger Coalition* atau Koalisi Penantang yang memiliki kepentingannya sendiri dan berbeda dengan aktor-aktor sebelumnya.

Lebih jauh, stigma buruk yang terbentuk karena sejarah di masa lampau ini kemudian digunakan oleh orang-orang nasionalis Turki sebagai “alat” untuk melemahkan pengaruh aktor-aktor pro Kurdi ini supaya tidak memiliki pengaruh yang kuat dalam perpolitikan di Turki. Sehingga dengan memiliki legitimasi yang lebih kuat dibanding HDP dan Aliansi Buruh dan Kebebasan membuat kebijakan-kebijakan dan tindakannya selalu dibenarkan walau itu melanggar HAM. Tuduhan-tuduhan terhadap HDP dan Aliansi bersama dengan anggotanya sering kali tidak berdasarkan fakta yang sesuai. Seperti yang terjadi pada 2018 ketika Pengadilan Hak Asasi Eropa (ECHR) menuntut pembebasan mantan ketua HDP Demirtaş. ECHR menemukan adanya pelanggaran konstitusi Pasal 18 Konvensi Eropa. ECHR menganggap bahwa ada kepentingan tersembunyi dari penahanan Demirtaş, dan demikian ini dianggap sebagai penyalahgunaan kekuasaan. Namun kemudian walau ECHR telah mengajukan tuntutan pembebasan Demirtaş, pengadilan Turki menolak pembebasannya (AFP 2018).

Melihat sudut pandang HDP dan Aliansi Buruh dan Kebebasan terhadap kepentingan politik mereka, HDP dan Aliansi Buruh dan Kebebasan dapat diklasifikasikan ke dalam *challenger coalition*. Ini karena HDP masih memegang nilai-nilai nasionalis Kurdi dengan terus mengangkat isu-isu Kurdi di tengah kepentingan politik Turki, namun di sisi lain mereka juga tidak mendukung

sepenuhnya terhadap gerakan-gerakan konflik bersenjata yang dilakukan oleh kelompok separatis seperti PKK.

Dalam melakukan retorika politik untuk mendapat dukungan dalam kontestasi politik di Turki, mereka selalu menggaungkan tentang kepedulian mereka terhadap kaum minoritas dan orang-orang Kurdi yang tertindas dan merasa haknya terampas oleh negara. Meski begitu, HDP tidak serta merta melakukan tindakan yang *offensive* yang memicu kekerasan. Dalam menyuarakan kepentingannya, HDP lebih memilih jalan damai tanpa kekerasan dan mengecam segala tindakan kekerasan apapun.

Seperti pada 26 September 2022 dalam peristiwa serangan Mersin di Turki yang didalangi oleh PKK, HDP mengutuk serangan tersebut. Selahattin Demirtaş mantan ketua HDP menyampaikan kritik bahwa ia tetap berpegang teguh pada prinsip politik demokratis, bahkan Demirtaş menyampaikan bahwa ia akan menghancurkan fasisme (Serbestiyet 2022).

Dengan kepentingan yang dimiliki HDP sebagai partai Kurdi yang lebih nasionalis, membuat kepentingan mereka menjadi berebeda dengan kelompok dominan yakni AKP sebagai pemegang kendali kekuasaan pada pemerintahan Turki saat ini. Menjadikan mereka sebagai satu-satunya kelompok penantang dalam konteks persoalan Kurdi. Akhirnya karena legitimasi yang lemah dan kemampuan AKP sebagai *inner circle* yang mampu mengkooptasi militer dan birokrasi ke dalam kelompok dominan. Membuat HDP selalu berusaha untuk disingkirkan oleh kelompok dominan yang lebih superior.

3.3 Political Settlement Excluded Coalition

Ketika menjelang pemilihan 2023 di Turki kebanyakan orang akan membahas mengenai koalisi-koalisi partai dan tentunya partai HDP bersama koalisinya yang pro Kurdi dengan berbagai pertanyaan yang terbentuk. Namun kemudian ada aktor lain di luar semua koalisi partai namun memiliki pengaruh yang cukup besar dalam isu politik di Turki terutama ketika membahas mengenai masalah demokrasi di Turki yang menyangkut masalah Kurdi. Aktor politik kontemporer di Turki yang termasuk ke dalam *Excluded Coalition* yang masih ada hingga saat ini adalah PKK sebagai kelompok separatis Kurdi.

Sebagai kelompok separatis yang kemudian dicap sebagai kelompok teroris oleh Uni Eropa, PKK dalam pergerakannya selalu diawasi. Ini terjadi karena aksi mereka dalam memperjuangkan berdirinya negara Kurdistan sebagian besar dilakukan dengan cara konflik bersenjata. Sehingga kemudian ini yang menjadi alasan PKK dicap sebagai teroris.

Turki sendiri selalu meminta bantuan dari negara lain terutama negara-negara Uni Eropa jika ada anggota yang diduga berafiliasi dengan PKK datang ke wilayah mereka untuk ditangkap. Turki begitu kerasnya dalam menghadapi PKK bukan tanpa sebab. Turki merasa bahwa hadirnya PKK untuk memperjuangkan hak-hak Kurdi dengan cara konflik bersenjata dapat mengancam integrasi negara. Kemudian Turki juga dalam melakukan negosiasi dengan PKK selalu diam-diam dan hanya diketahui oleh segelintir orang-orang penting di Turki.

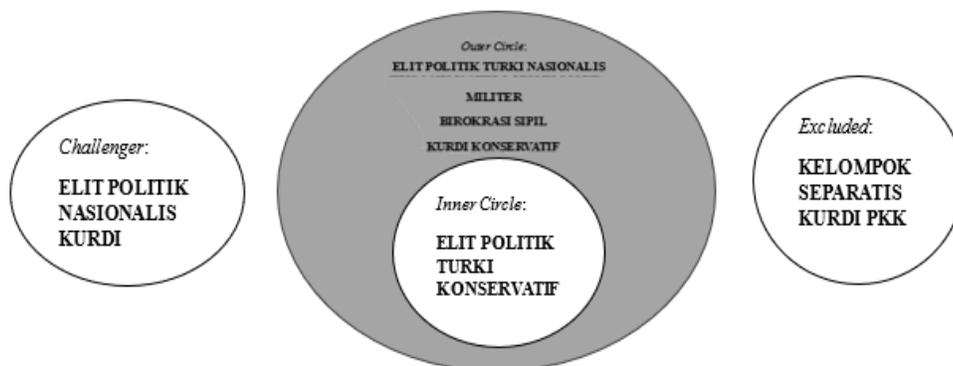
PKK sebagai organisasi yang berbasis gerakan bersenjata yang menuntut berdirinya negara Kurdistan menyebabkan ketidakstabilan politik di Turki karena melakukan gerakan separatis bersenjata, membuat mereka dapat diklasifikasikan

sebagai aktor yang masuk ke dalam *excluded coaliton*. Karena dengan pandangan yang mereka miliki berbeda dengan aktor-aktor sebelumnya, mereka sama sekali tidak memiliki kepedulian terhadap kestabilan negara yang sekarang menduduki tanah yang mereka anggap sebagai tanah Kurdistan. Kepedulian dan kepentingan mereka hanya tentang bagaimana negara Kurdistan dapat berdiri, sehingga mereka berusaha untuk menyingkirkan penguasa yang menduduki tanah mereka. Sebagai buktinya adalah segala penyerangan-penyerangan yang dilakukan oleh PKK sejak tahun 1980an dan pada 1 Oktober 2023 PKK mengakui bahwa mereka melakukan serangan bom bunuh diri di Ankara dan melukai polisi (Staff 2023).

Dengan sikapnya ini, kemudian menimbulkan ketidakstabilan di Turki karena PKK menyebabkan teror bagi masyarakat Turki. Dengan konflik bersenjata yang dijalankan oleh PKK, membuat ancaman bagi integrasi negara Turki yang kemudian banyak ditentang oleh aktor-aktor politik Turki dan negara-negara pro Turki. Sehingga kemudian Uni Eropa melabeli PKK sebagai salah satu organisasi teroris yang keberadaannya dilarang.

Gambar 9 Political Settlement Turki dalam Konteks Persoalan Kurdi

Tahun 2018-2023



Sumber: Pola Pribadi

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Konflik yang terjadi antara orang-orang Kurdi dan pemerintah Turki telah terjadi sejak awal Turki merdeka sebagai negara republik. Sejarah perebutan wilayah otonom orang-orang Kurdi dan pemerintah Turki yang berkuasa menjadi hal yang hingga kini menjadi masalah demokrasi di Turki. Berbagai peristiwa konflik mewarnai tahun demi tahun sejak berdirinya Turki sebagai negara republik. Konflik politik dengan berbagai macam kepentingan hingga menyebabkan pembubaran partai-partai politik pro Kurdi menjadi hal yang kerap terjadi. Konflik senjata menjadi bagian pendamping sebagai rasa frustrasi dari kedua belah pihak.

Di lain sisi meskipun berbagai konflik terjadi, banyak upaya juga yang dilakukan supaya konflik yang menjadi racun bagi berdirinya demokrasi di Turki ini agar segera berakhir. Perjanjian Imralı, Oslo dan Proses Resolusi menjadi bukti nyata bahwa masih ada upaya yang dilakukan untuk meredam konflik ini. Meskipun hingga saat ini belum ada cara jitu untuk menyelesaikan persoalan Kurdi di Turki ini.

Melihat peta politik Turki saat ini, kelompok CHP sebagai rival AKP dalam kontestasi pemilihan tentunya akan dianggap sebagai lawan karena perebutan suara untuk mendapatkan posisi pucuk pimpinan dalam parlement. Begitu pun dengan HDP sebagai partai Kurdi terbesar saat ini yang kemudian mengambil sikap untuk mendukung CHP. Namun kemudian jika melihat perilaku setiap aktor dengan seksama terhadap persoalan Kurdi, kita mungkin akan melihat siapa yang sebetulnya lawan dan siapa sebetulnya kawan.

Menggunakan konsep *Political Settlement* untuk menganalisis dan membagi setiap aktor ke dalam beberapa kelompok, penulis melihat bahwa AKP dan CHP secara tidak langsung membentuk kesepakatan politik untuk membuat kepentingan nasionalis Turki tetap menjadi prioritas. CHP yang terlihat seperti aktor yang sangat peduli terhadap hak-hak kemanusiaan terhadap kelompok yang termarjinalkan, tidak dapat membuktikan dengan konkrit bahwa mereka juga akan benar-benar menyelesaikan permasalahan Kurdi. Sehingga tidak ada yang membedakan antara CHP dengan AKP yang hanya peduli terhadap kepentingan nasionalis Turki untuk membangun demokrasi di Turki dengan masyarakat yang homogen. Namun ada hal yang menarik di sini adalah HÜDA-PAR sebagai aktor kurdi konservatif yang terkooptasi ke dalam kelompok dominan yang menguatkan otoritas AKP sebagai *inner circle*.

Maka di sini HDP sebagai partai pro Kurdi yang akan menjadi pembeda dalam melihat isu Kurdi dan menjadi aktor utama yang akan memperjuangkan hak-hak Kurdi seperti menyetarakan hak-hak orang minoritas terutama Kurdi untuk setara dengan orang asli Turki. Kemudian hak untuk secara bebas mempertahankan budaya-budaya lokal Kurdi. Namun dengan cita-cita kelompok dominan yang ingin membentuk masyarakat yang homogen, membuat kepentingan HDP tidak dapat diakomodasi dan akhirnya menimbulkan konflik. Di sisi lain aktor yang juga turut memperjuangkan kepentingan Kurdi adalah PKK, namun mereka aktor yang berbeda dengan aktor-aktor sebelumnya. PKK mengambil langkah melalui konflik bersenjata untuk melawan pemerintah dan mengesampingkan nilai-nilai demokratis. Dengan sikapnya ini akhirnya mereka selalu diperangi oleh otoritas Turki.

4.2 Saran

Hasil penelitian ini melihat bahwa istilah musyawarah dan duduk bersama atau secara formal disebut dengan perundingan dengan menurunkan ego masing-masing pihak untuk menemukan jalan tengah menjadi relevan jika melihat kasus yang terjadi di Aceh. Pemerintah Turki dan kelompok politik Kurdi seharusnya dapat melakukan pertimbangan dengan melihat kasus serupa jika dengan serius ingin menyelesaikan persoalan kasus Kurdi dan kepentingan mereka tidak dilandasi dengan ego untuk menguntungkan diri sendiri. Pihak ketiga pun seharusnya dapat hadir menjadi mediator untuk membantu menyelesaikan permasalahan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abussamad, Zuchri. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press. Accessed Juli 25, 2023.
- AFP, AP, dpa, Reuters. 2018. *Turkish court keeps Kurdish politician in jail – DW – 12/01/2018*. Desember 1. Accessed Juni 23, 2023. <https://www.dw.com/en/turkish-court-rejects-european-rights-court-ruling-to-release-top-kurdish-politician/a-46532769>.
- Akin, Ezgi, and Rosie Scammell. 2023. *Turkey's pro-Kurdish party HDP faces threat of closure after top court ruling*. Januari 26. Accessed September 1, 2023. <https://www.al-monitor.com/originals/2023/01/turkeys-pro-kurdish-party-hdp-faces-threat-closure-after-top-court-ruling>.
- Alaranta, Toni. 2018. "TURKEY'S PRESIDENTIAL SYSTEM AND THE KURDS :INCREASED RESENTMENT, FRAGMENTATION, OR DEAL-MAKING?" Accessed Agustus 11, 2023. https://www.fii.fi/wp-content/uploads/2018/11/bp251_kurds_in_turkey.pdf.
- Arifin, A., and Sri Kurnia Sari. 2020. "Analisis Kudeta Militer Turki Tahun 2016." *LWSA Conference Series LWSA Conference Series III (2)*: 10-17. Accessed Agustus 10, 2023. doi:10.32734/lwsa.v3i3.911.
- AYDIN, SELÇUK. 2023. *The Kurdish Vote and the Turkish Election*. April 20. Accessed September 1, 2023. <https://carnegieendowment.org/sada/89583>.
- BBC. 2021. *Turkey moves to ban pro-Kurdish HDP opposition party*. Maret 17. Accessed September 1, 2023. <https://www.bbc.com/news/world-europe-56438070>.
- Beriş, Hamit Emrah. 2023. "The People's Alliance Ahead of The May 14, 2023 Elections." 7-44. Istanbul: SETA. <https://setav.org/en/assets/uploads/2023/05/R230En.pdf>.
- Brinnatinica. 2023. *Treaty of Lausanne | Summary, Terms, & Facts*. Juni 8. Accessed Agustus 3, 2023. <https://www.britannica.com/event/Treaty-of-Lausanne-1923>.
- Çiçek, Cuma. 2018. "The Failed Resolution Process and the Transformation of Kurdish Politics." *Middle East Report (288)*: 19-24. Accessed Agustus 17, 2023. <https://www.jstor.org/stable/45198319>.
- Daily Sabah. 2023. *HÜDA-PAR supports People's Alliance in Türkiye elections*. Maret 19. Accessed Agustus 29, 2023. <https://www.dailysabah.com/politics/elections/huda-par-supports-peoples-alliance-in-turkiye-elections>.
- Esen, Berk. 2022. "The Opposition Alliance in Turkey: A Viable Alternative to Erdoğan?" *SWP Comment (52)*: 1-7. Accessed Agustus 25, 2023. doi:10.18449/2022C52v02.
- Euronews. 2023. *HDP'yi ziyaret eden Kılıçdaroğlu: Kürt sorunu dahil bütün sorunların adresi TBMM'dir*. Maret 20. Accessed September 24, 2023. <https://tr.euronews.com/2023/03/20/hdpyi-ziyaret-eden-kilicdaroglu-kurt-sorunu-dahil-butun-sorunlarin-adresi-tbmmidir>.
- Foster, Anna. 2023. *Turkey freezes pro-Kurdish party funds before vote*. Januari 5. Accessed September 1, 2023. <https://www.bbc.com/news/world-europe-64179858>.

- Gadzhiev, Amur. 2023. *Turkey on the Eve of Presidential and Parliamentary Elections: Balance of Political Forces in the Country*. April 19. Accessed Juni 21, 2023. https://russiancouncil.ru/en/analytics-and-comments/analytics/turkey-on-the-eve-of-presidential-and-parliamentary-elections-balance-of-political-forces-in-the-cou/?sphrase_id=97812031.
- Günaydın, Abdulhakim. 2023. *Millet İttifakı'nın mutabakat metnine eleştiri: "Kürtlere hiç değinilmemesi inkar siyasetinin devam edeceğinin işaretidir"*. Februari 1. Accessed September 24, 2023. <https://www.indyturk.com/node/605936/siyaset/millet-i-CC%87ttifak%C4%B1n%C4%B1n-mutabakat-metnine-ele%C5%9Ftiri-k%C3%BCrtlere-hi%C3%A7-de%C4%9Finilmemesi-inkar>.
- Hassan, Mirza. 2013. *Political settlement dynamics in a limited-access order: The case of Bangladesh*. Effective States and Inclusive Development Research Centre (ESID), The University of Manchester. Accessed Juli 18, 2023.
- Hayati, Ela Hikmah. 2017. "Kebijakan Politik Mustafa Kemal Atatürk terhadap Suku Kurdi di Turki 1923-1938 M." *Mimbar Sejarah, Sastra, Budaya, dan Agama XXIII*: 231-249. Accessed Agustus 2023. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/al-turats/article/view/6374/3913>.
- Hoffman, Max. 2019. *The State of the Turkish-Kurdish Conflict*. Agustus 12. Accessed Agustus 10, 2023. <https://www.americanprogress.org/article/state-turkish-kurdish-conflict/>.
- Jacinto, Leela. 2023. *Erdogan backs Kurdish Islamist party – and women pay the price*. Juni 6. Accessed Oktober 26, 2023. <https://www.france24.com/en/middle-east/20230602-erdogan-backs-kurdish-islamist-party-%E2%80%93-and-women-pay-the-price>.
- Karim, Abdul Hafizh, and M. Hamdan Basryar. 2018. "Perwujudan Competitive Authoritarianism di Turki pada Perencanaan dan Proses Referendum 2017." *JURNAL POLITIK IV* (1): 32-51. Accessed Agustus 10, 2023. doi:<https://doi.org/10.7454/jp.v4i1.185>.
- Köse, Talha. 2017. "Rise and Fall of the AK Party's Kurdish Peace Initiatives." *Insight Turkey XIX* (2): 139-165. Accessed Agustus 17, 2023. doi:[10.25253/99.2017192.08](https://doi.org/10.25253/99.2017192.08).
- Kurban, Dilek. 2020. "The Kurdish Question in Historical Context." *In Limits of Supranational Justice: The European Court of Human Rights and Turkey's Kurdish Conflict* 79-132. Accessed Agustus 3, 2023. doi:[10.1017/9781108776585.004](https://doi.org/10.1017/9781108776585.004).
- Library of Congress Federal Research Division. 1996. *Turkey: A Country Study*. 5th. Edited by Helen Chapin Mertz. Accessed Agustus 3, 2023. <https://apps.dtic.mil/sti/citations/ADA307300>.
- McDowall, David. 2004. *A modern history of the Kurds*. Bloomsbury Academic. Accessed Agustus 3, 2023.
- Nurhandjati, Nurul. 2019. "POLITICAL SETTLEMENTS: ANTARA KONSEP DAN REALITAS." *Jurnal Politik Profetik 7*: 250-271.
- O'zpek, Burak Bilgehan. 2019. "The State's Changing Role Regarding the Kurdish Question of Turkey: From Consistent Tutelage to Volatile Securitization."

- Alternatives: Global, Local, Political* XLIV (1): 36-49. Accessed Agustus 17, 2023. doi:10.1177/0304375419854599.
- O'Connor, Francis. 2017. *The Kurdish Movement in Turkey: Between Political Differentiation and Violent Confrontation*. Edited by Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung. Peace Research Institute Frankfurt (PRIF). Accessed Agustus 3, 2023. https://www.hsfk.de/fileadmin/HSFK/hsfk_publicationen/prif147.pdf.
- Öney, Berna. 2019. *Ethnicity and Party Politics in Turkey: The Rise of the Kurdish Party During the Kurdish Opening Process*. Taylor & Francis. Accessed Juni 22, 2023.
- Özpek, Burak Bilgehan. 2022. *Başkanlık Sistemi ve Demokrasi*. September 18. Accessed Oktober 26, 2023. <https://daktilo1984.com/d84intelligence/baskanlik-sistemi-ve-demokrasi/>.
- Parks, Thomas. 2010. *Political Settlements: Implications for International Development Policy and Practice*. The Asia Foundation. doi:10.13140/RG.2.2.17925.01768.
- Pusane, Özlem Kayhan. 2015. "Turkey's Military Victory over the PKK and Its Failure to End the PKK Insurgency." *Middle Eastern Studies* 727-741. Accessed Agustus 7, 2023. doi:10.1080/00263206.2014.979801.
- Reynolds, Aaron Smith. 2023. "The "New Turkey" Might Have Come to An End: Here's Why." *Middle East* (2): 2-12. Accessed Agustus 29, 2023. doi:<https://doi.org/10.57671/gfme-23022>.
- Riaz, Ali. 2020. "Three Decades of Bangladeshi Politics (1990-2019): The Emergence and Collapse of the Political Settlements." *Journal of Governance, Security & Development* 109-139. Accessed 2023. doi:10.52823/LVRO4766.
- Romano, David. 2014. *The Kurdish Nationalist Movement: Opportunity, Mobilization, and Identity*. Cambridge University Press. Accessed Agustus 2, 2023.
- Sahide, Ahmad. 2013. "Suku Kurdi dan Potensi Konflik di Timur Tengah." *JURNAL HUBUNGAN INTERNASIONAL* 2: 140-145. Accessed Maret 30, 2023. doi:<https://doi.org/10.18196/hi.2013.0035.139-145>.
- Şar, Edgar. 2023. "The Post-Erdoğan Vision of Turkish Opposition: Opportunities and Limitations." *SWP Comment* (7): 1-8. Accessed Agustus 25, 2023. doi:10.18449/2023C07.
- Serbestiyet. 2022. *PKK'nın kınama eleştirisinden sonra Demirtaş'tan 'geri adım yok' mesajı: Kimse geri adım atmamızı beklemesin; demokratik siyasette ısrar edeceğiz, faşizmi yıkacağız*". September 30. Accessed Oktober 9, 2023. <https://serbestiyet.com/haberler/pkknin-kinama-elestirisinden-sonra-demirtastan-geri-adim-yok-mesaji-kimse-geri-adim-atmamizi-beklemesin-demokratik-siyasette-ısrar-edecegiz-fasizmi-yikacagiz-105592/>.
- Staff, The New Arab. 2023. *Turkey's Kurdish PKK claim responsibility for Ankara attack*. Oktober 1. Accessed Oktober 26, 2023. <https://www.newarab.com/news/turkeys-kurdish-pkk-claim-responsibility-ankara-attack>.
- Tashjian, Yeghia. 2023. *What is the Kurdish-led HDP's position on Turkey's elections?* Maret 29. Accessed September 1, 2023.

- <https://armenianweekly.com/2023/03/29/what-is-the-kurdish-led-hdps-position-on-turkeys-elections/>.
- The New Arab & agencies. 2015. *Profile: The Peoples' Democratic Party in Turkey (HDP)*. Juni 8. Accessed Juni 22, 2023. Profile: The Peoples' Democratic Party in Turkey (HDP).
- Üngör, Ugur Ümit. 2011. *The Making of Modern Turkey: Nation and State in Eastern Anatolia, 1913–1950*. Oxford: Oxford University Press. Accessed August 2023. doi:10.1111/j.1540-6563.2012.00328_66.x.
- Yeğen, Mesut. 2015. "The Kurdish Peace Process in Turkey: Genesis, Evolution and Prospects." In *Global Turkey in Europe III: Democracy, Trade, and the Kurdish Question in Turkey-EU Relations*, edited by Senem Aydın-Düzgit, Daniela Huber, Meltem Müftüler-Baç, E. Fuat Keyman, Michael Schwarz and Nathalie Tocci, 157-184. Edizioni Nuova Cultura. Accessed August 10, 2023. <https://ipc.sabanciuniv.edu/Content/Images/CKeditorImages/20200313-12031692.pdf>.